

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TABALONG
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TABALONG
NOMOR HK.02.02.28B.12.25.147 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
TABALONG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TABALONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai POM di Tabalong tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tabalong Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI TABALONG TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI TABALONG TAHUN 2025-2029. |
| Kesatu | : | Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai POM di Tabalong Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Tabalong, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| Kedua | : | Renstra Balai POM di Tabalong memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai POM di Tabalong untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan. |

- Ketiga : Renstra Balai POM di Tabalong sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai POM di Tabalong dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai POM di Tabalong.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 5 Desember 2025
KEPALA BALAI POM DI TABALONG



TAUFIQURROHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI TABALONG NOMOR
HK.02.02.28B.12.25.147
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI TABALONG TAHUN 2025-
2029

RENCANA STRATEGIS
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TABALONG
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39) , klasifikasi UPT dari Loka POM di Kabupaten Tabalong berubah menjadi Balai POM di Tabalong dengan wilayah kerja Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Balai POM di Tabalong memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar pada wilayah kerja atau area pengawasan aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, Balai POM di Tabalong bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang beredar di pasar.

Balai POM di Tabalong memiliki peranan penting terhadap pengawasan produk yang beredar di wilayah kerja atau area pengawasan (Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah), melalui pengawasan pre-market dan pengawasan post market, selain itu Balai POM di tabalong turut mendukung pertumbuhan UMKM di wilayah kerja dengan berperan aktif melakukan pendampingan, melakukan Komunikasi,

Informasi dan edukasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha, dan juga melakukan penindakan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

Balai POM di Tabalong juga turut berkontribusi dalam melakukan pengawalan terhadap Program Prioritas Nasional yaitu Makan Bergizi Gratis, dimana Balai POM di Tabalong memastikan terpenuhinya standar sarana prasarana dan keamanan pangan sehingga terselenggaranya pemenuhan gizi yang aman dan bermutu terhadap makan yang disajikan sehingga layak untuk dikonsumsi. Pengawalan ini dilakukan pada area pengawasan yaitu di Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Tabalong untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Renstra Balai POM di Tabalong dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan. Pendekatan ini memungkinkan Balai POM di Tabalong untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Renstra Balai POM di Tabalong 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, Balai POM di Tabalong bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

Tugas dan Fungsi Balai POM di Tabalong adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan Makanan Balai POM di Tabalong menyelenggarakan Fungsi :

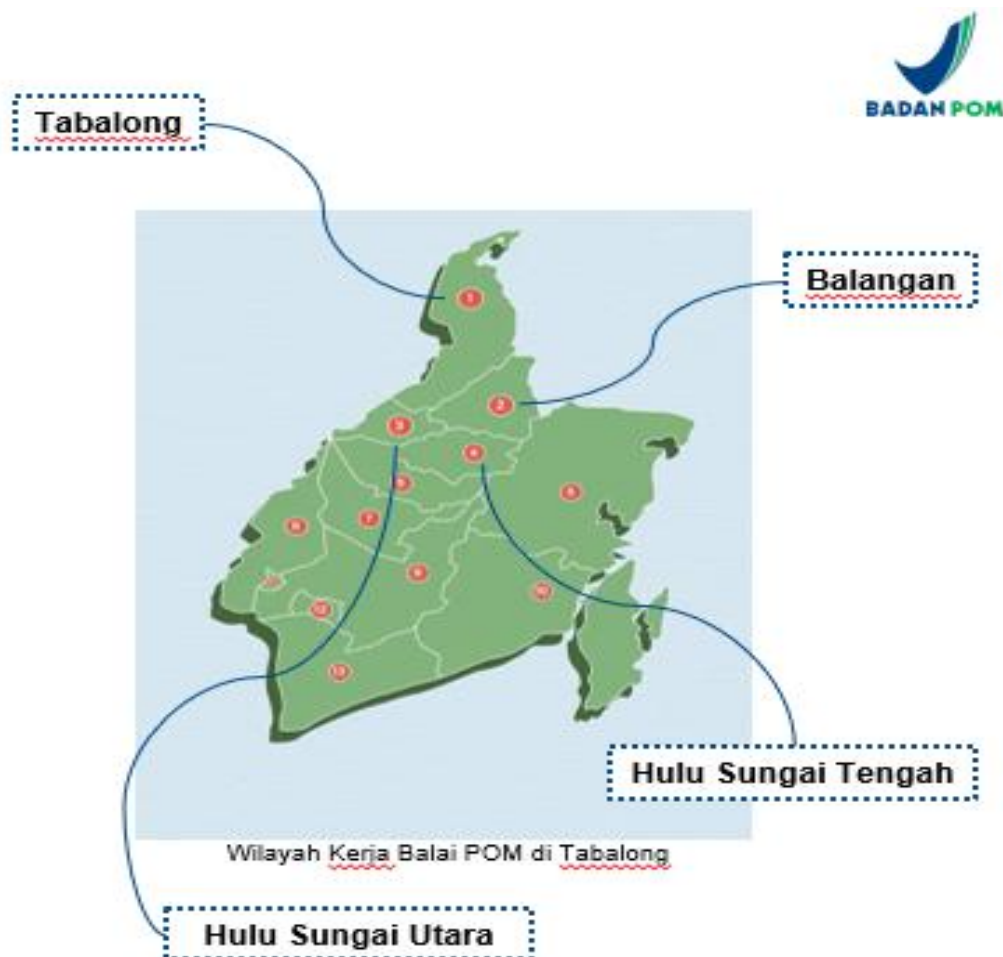
- 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- 5) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- 6) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- 7) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;

- 8) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- 9) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 10) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- 11) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 12) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 13) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 14) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Selain, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, seluruh Kementerian/Lembaga termasuk BPOM diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing sebagaimana tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Tabalong memiliki 4 (empat) wilayah kerja yaitu:

1. Kabupaten Tabalong
2. Kabupaten Balangan
3. Kabupaten Hulu Sungai Utara
4. Kabupaten Hulu Sungai Tengah



Gambar 1.1. Wilayah Kerja Balai POM di Tabalong

Struktur Organisasi Balai POM di Tabalong terdiri dari :

a) Kepala Balai ;

b) Subbagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Bagian Tata Usaha terdiri dari Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

c) Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugasnya, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Berikut Struktur Organisasi Balai POM di Tabalong :



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai POM di Tabalong

1.1.1 Capaian Kinerja Renstra Balai POM di Tabalong Tahun 2022-2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, dan indikator kinerja sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra pada tahun 2022-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Balai POM di Tabalong Tahun 2022-2024

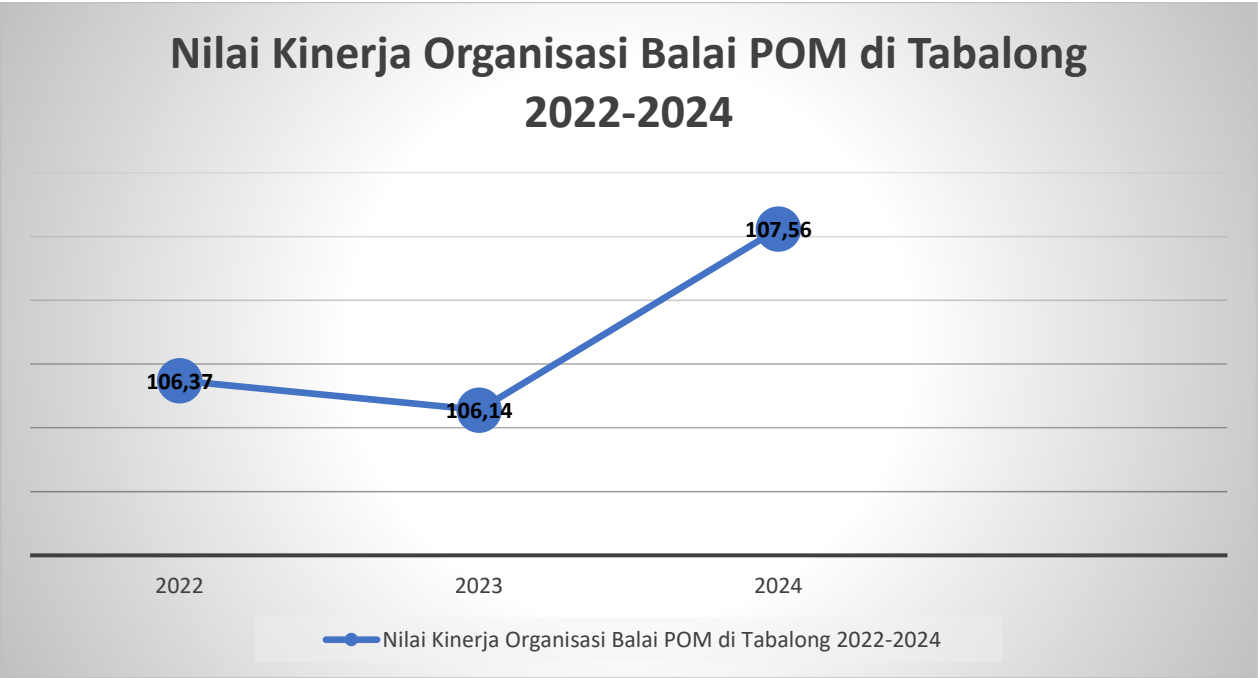
Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK 1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat									
Persentase Obat Menenuhi Syarat	86	81.99	95.34	90	97.39	108.21	92.3	97.46	105.59
Persentase Makanan Memenuhi Syarat	95	96.55	101.63	96	89.29	93.01	90	95.35	105.94
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	70	80.46	89	94.83	106.55	90	98.84	109.82
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	100	112.36	90	100	111.11	98	100	102.04
Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	0	0	0	94	100	106.38	94	100	106.38
SK 2 : Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik									
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	83	100	120.48	86	100	116.28	89	95.08	106.83
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	77	124.19	65	76.85	118.23	70	74.06	105.80
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62	73.91	119.21	66	84	127.27	70	83.78	119.69
Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	69	74.51	107.99	72	85.20	118.33	75	75.33	100.44
Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	77	100	129.87	79	100	126.58	81	100	123.46
SK 3 : Meningkatnya Efektivitas Komunikasi,Informasi, Edukasi Obat dan Makanan									
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	89.30	93	104.14	91	95.74	105.21	95.58	97.13	101.62
SK 4. : Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan									
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	50	60	120	50	50	100
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	50	60	120	50	50	100
SK 5 :Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan									
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85	125	147.06	88	76	86.36	90	92.50	102.78

SK 6 :Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal									
Persentase implementasi rencana aksi RB	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nilai AKIP	0	0	0	82.20	75.73	92.13	74.29	76.99	103.63
SK 7 : Terwujudnya SDM yang Berkinerja Optimal									
Indeks profesionalitas ASN	84	86.15	102.56	84.50	90.08	106.60	91.31	87.67	96.01
SK 8 : Menguatnya Laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan									
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	2.5	3	120	2.5	3	120	3	3	100
SK 9 : Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel									
Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.60	91	100.44	91.80	92.21	100.45	91.86	92.37	100.56

Sumber : Laporan Kinerja Balai POM di Tabalong Tahun 2022,2023,dan 2024

Jika dilihat perkembangannya selama tiga tahun terakhir, Nilai Kinerja Organisasi Balai POM di Tabalong dalam periode 2022 - 2024 bergerak secara fluktuatif. Pada Tahun 2022 Capaian Kinerja berada pada nilai 106.37, mengalami penurunan nilai pada Tahun 2023 sebanyak (0.23) poin, Pada Tahun 2024 Nilai Kinerja Organisasi mengalami peningkatan (1.42) poin. Pada Periode Tahun 2022-2024, Balai POM di Tabalong selalu konsisten terus meningkatkan capaian kinerja Organisasinya. Berikut hasil kinerja Balai POM di Tabalong tahun 2022-2024 disajikan dalam grafik sebagai berikut.



Gambar 1.3 Nilai Kinerja Organisasi Balai POM di Tabalong Tahun 2022-2024

Pengukuran kinerja Balai POM di Tabalong mengacu pada Sasaran Strategis yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Tabalong. Dalam penyusunan sasaran strategis, Balai POM di Tabalong menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu stakeholders perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective.

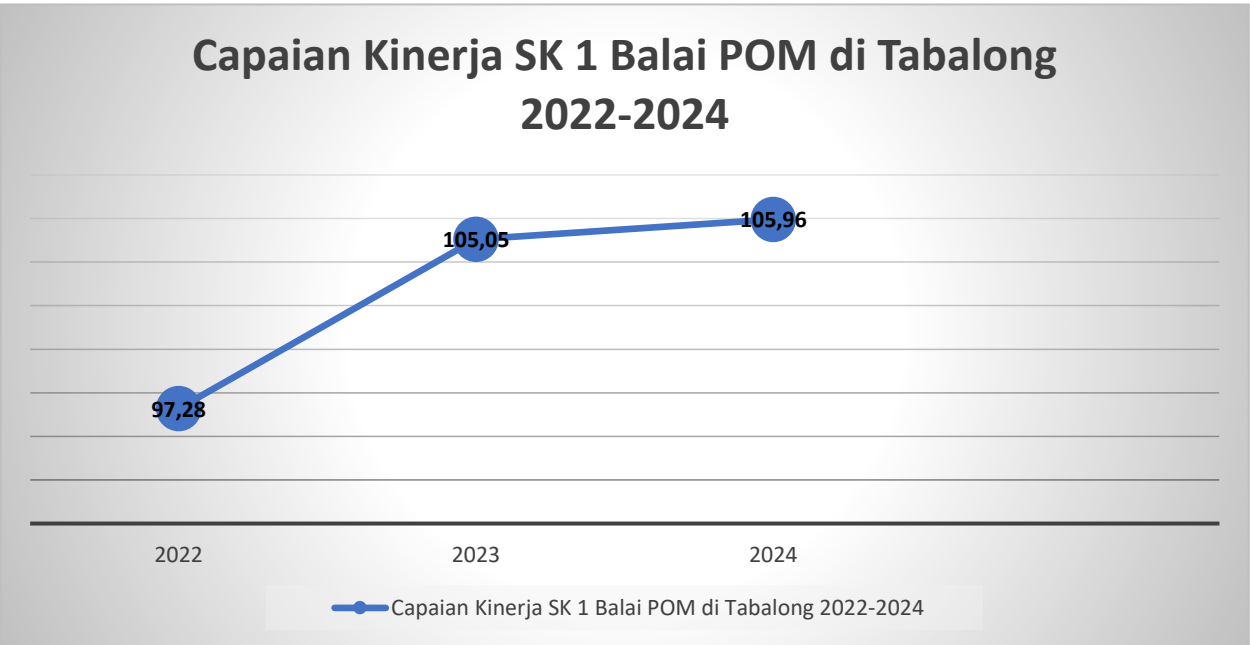
1. Sasaran Kegiatan (SK1)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT

Pada Sasaran Kegiatan Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Tabalong didukung 5 Indikator Kinerja diantaranya :

- 1. Persentase Obat yang memenuhi syarat;
- 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat;
- 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan;
- 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; dan
- 5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat.

Berikut ini Grafik Tren capaian kinerja SK1 Balai POM di Tabalong tahun 2022-2024



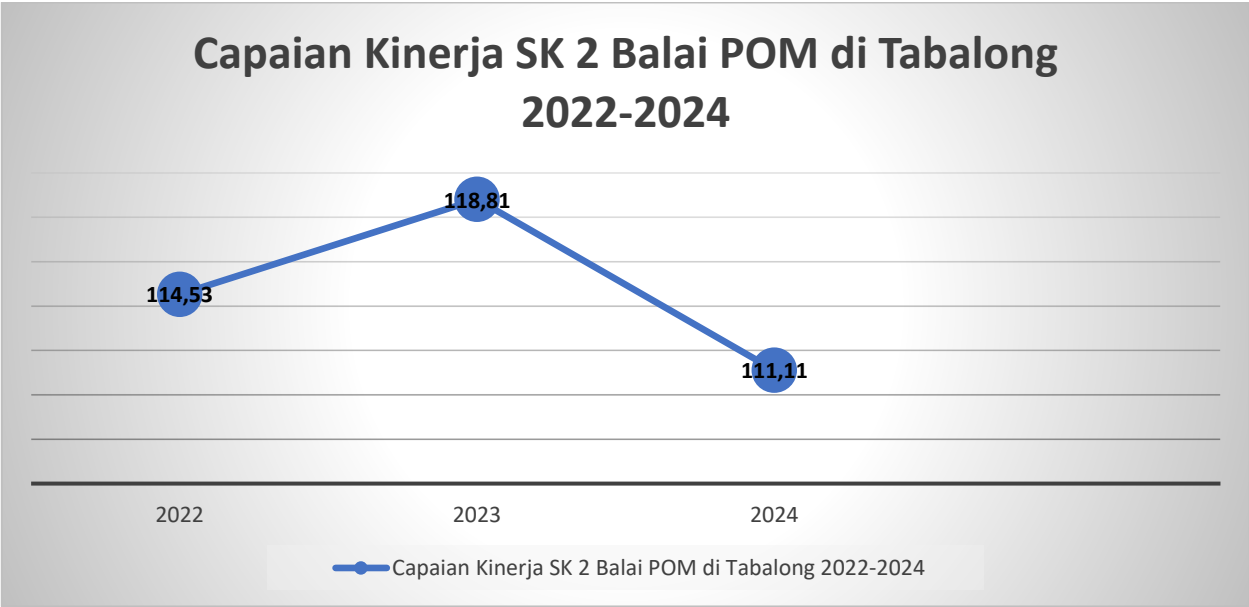
Gambar 1.4 Tren Capaian Kinerja SK 1 Balai POM di Tabalong Tahun 2022-2024

Grafik ini menggambarkan perjalanan Balai POM di Tabalong dalam mewujudkan SK1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja POM di Tabalong . Data dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan Tren yang positif dalam pencapaian kinerja. Pada tahun 2022 dengan capaian yang diperoleh sebesar 97.28%. Capaian ini berada dibawah target namun Capaian ini mengalami peningkatan tajam di tahun 2023 menjadi 105,05% dan 2024 menjadi 105,96%. Hal ini menunjukkan komitmen Balai POM di Tabalong dalam mengawal Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Tabalong dengan konsisten melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap berbagai aspek, mulai dari pengawasan pre market dan pengawasan post market.

2. Sasaran Kegiatan (SK2)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan sistem yang komprehensif agar Balai POM di Tabalong mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai POM di Tabalong, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Berikut ini Grafik Tren capaian kinerja SK2 Balai POM di Tabalong tahun 2022-2024



Gambar 1.5 Tren Capaian Kinerja SK 2 Balai POM di Tabalong Tahun 2022-2024

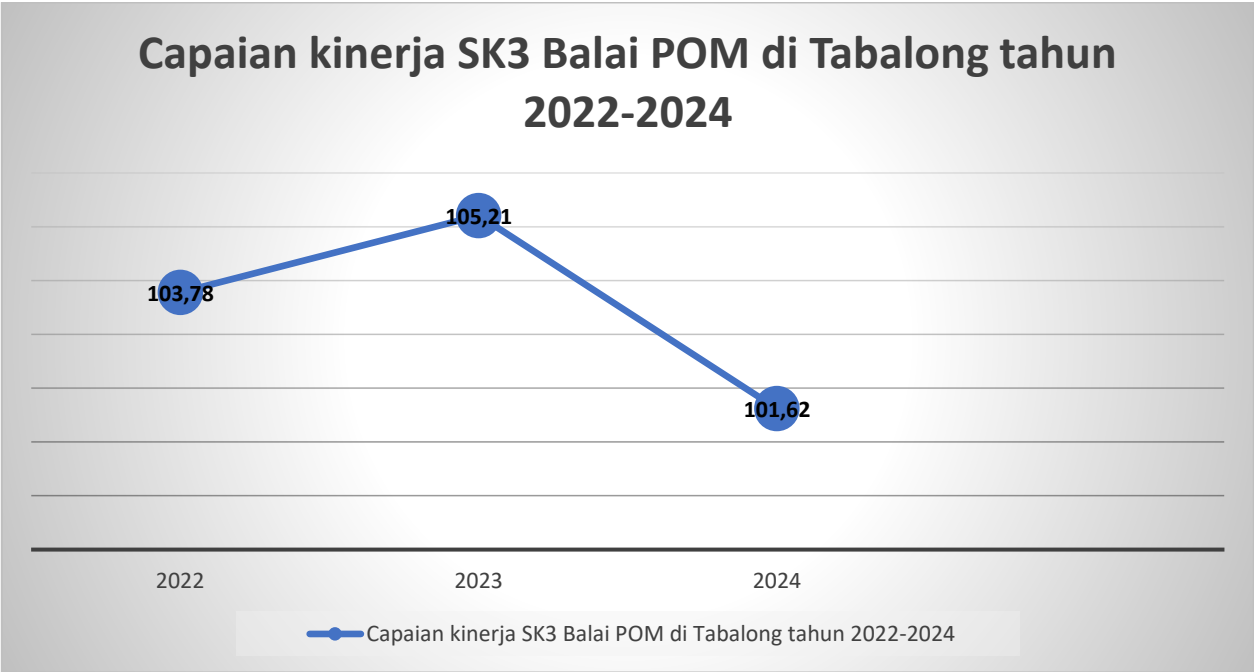
Grafik ini menggambarkan perjalanan Balai POM di Tabalong dalam mewujudkan SK2 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tabalong. Data dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan Tren yang fluktuatif dalam pencapaian kinerja yang terlihat sejak awal pada tahun 2022 dengan capaian yang diperoleh sebesar 114.53%. Capaian ini mengalami peningkatan tajam di tahun 2023 menjadi 118.81% dan 2024 mengalami penurunan menjadi 111.11%. Meskipun demikian, capaian kinerja ini masih berada diatas target yang direncanakan, hal ini menunjukkan adanya pengawalan terhadap manajemen kinerja yang selaras dengan perencanaan kinerja.

3. Sasaran Kegiatan (SK3)

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Sesuai Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal.Untuk itu perlunya sosialisasi atau edukasi ke masyarakat untuk dapat melindungi dirinya sendiri dan sekitar dari produk obat dan makanan yang berbahaya.

Berikut ini Grafik Tren capaian kinerja SK3 Balai POM di Tabalong tahun 2022-2024



Gambar 1.6 Tren Capaian Kinerja SK 3 Balai POM di Tabalong Tahun 2022-2024

Grafik ini menggambarkan perjalanan Balai POM di Tabalong dalam mewujudkan SK3 : Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tabalong. Data dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan Tren yang fluktuatif dalam pencapaian kinerja yang terlihat sejak awal pada tahun 2022 dengan capaian yang diperoleh sebesar 103.78%. Capaian ini mengalami peningkatan tajam di tahun 2023 menjadi 105.21% dan 2024 mengalami penurunan menjadi 101.62%. Meskipun demikian, capaian kinerja yang ini masih berada diatas target yang direncanakan, hal ini menunjukkan adanya pengawalan terhadap manajemen kinerja yang selaras dengan perencanaan kinerja.

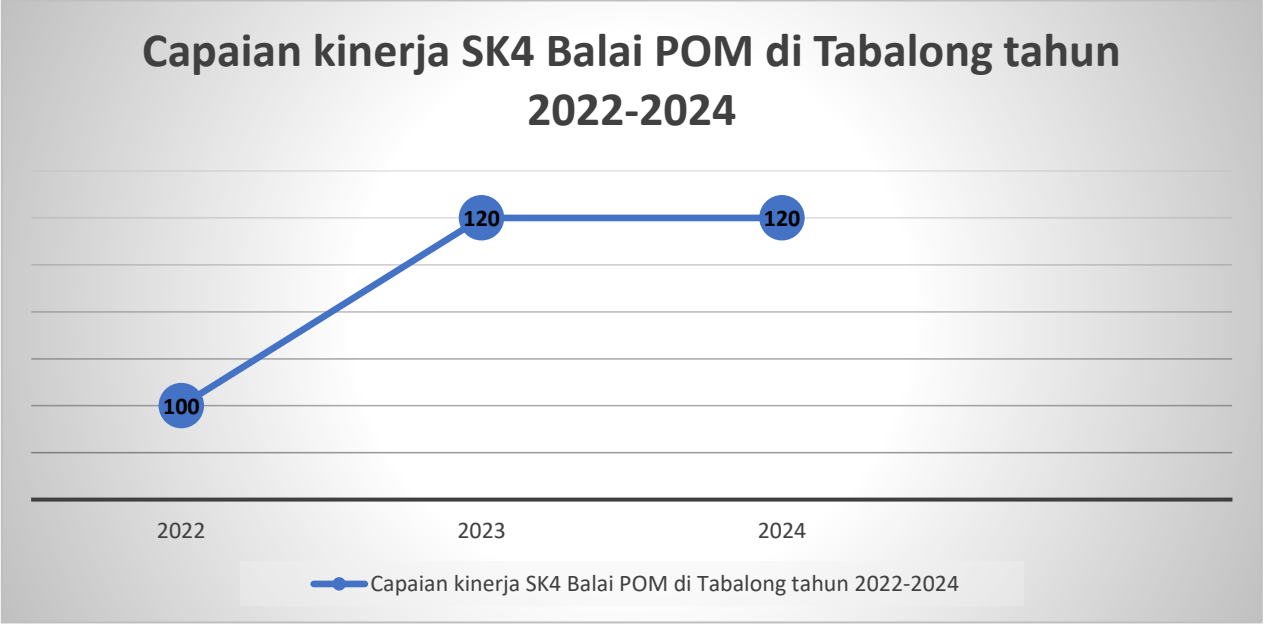
4. Sasaran Kegiatan (SK4)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024, sasaran kinerja ini didukung oleh 2 (dua) indikator yang memperoleh capaian kinerja sangat baik, namun pada kenyataannya masih banyak beredar produk - produk tidak memenuhi syarat. Hal ini menjadi perhatian BPOM untuk dapat melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja di khususnya meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan, yaitu :

- 1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
- 2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Berikut ini Grafik Tren capaian kinerja SK4 Balai POM di Tabalong tahun 2022-2024



Gambar 1.7 Tren Capaian Kinerja SK 4 Balai POM di Tabalong Tahun 2022-2024

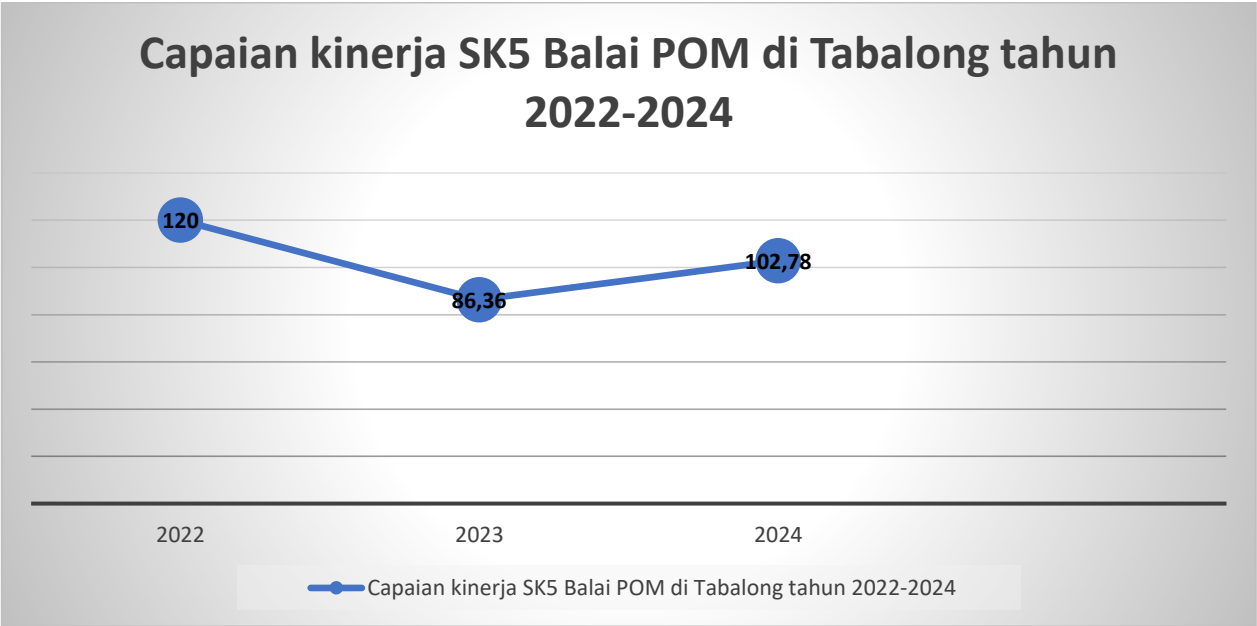
Balai POM di Tabalong secara berkelanjutan mengoptimalkan proses pemeriksaan dan pengujian produk obat dan makanan. Efektivitas dari kegiatan ini menjadi kunci dalam memastikan keamanan dan kepatuhan produsen terhadap standar yang ditetapkan, sekaligus menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik.

5. Sasaran Kegiatan (SK5)

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing kerja wilayah UPT

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai POM di Tabalong melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Berikut ini Grafik Tren capaian kinerja SK5 Balai POM di Tabalong tahun 2022-2024



Gambar 1.8 Tren Capaian Kinerja SK 5 Balai POM di Tabalong Tahun 2022-2024

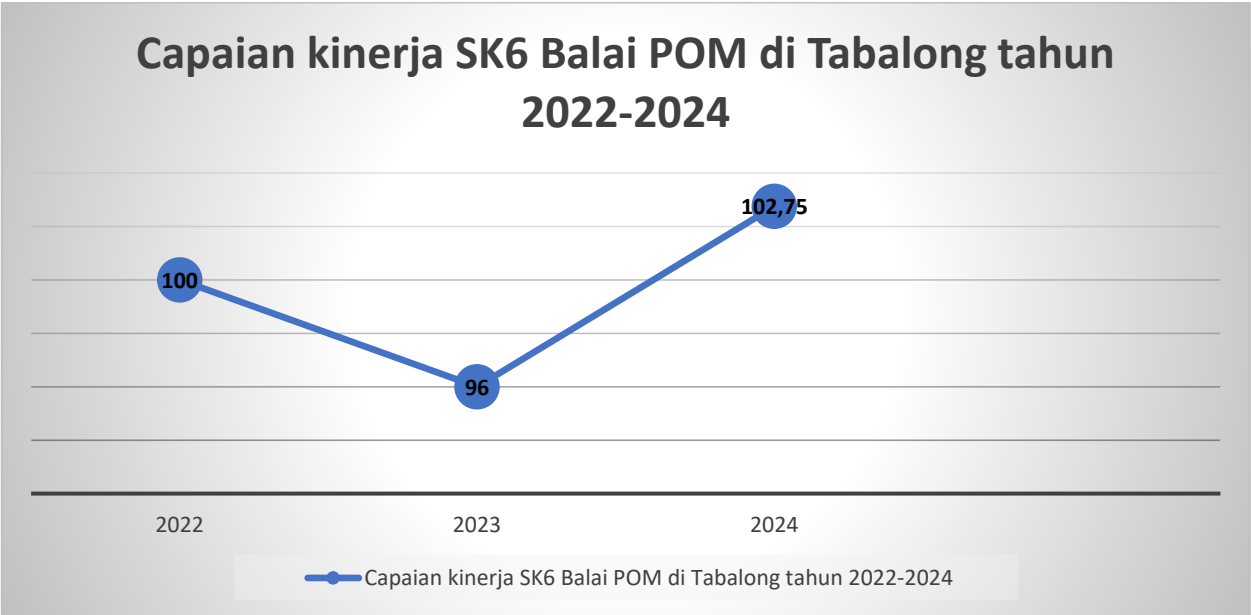
Grafik ini menggambarkan perjalanan Balai POM di Tabalong dalam mewujudkan SK5 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tabalong. Data dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan Tren yang fluktuatif dalam pencapaian kinerja yang terlihat sejak awal pada tahun 2022 dengan capaian yang diperoleh sebesar 120%. Capaian ini mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 86.36%, dikarenakan adanya perubahan metode perhitungan dalam pencapaian realisasi kinerja, yang dimana Balai POM di Tabalong pada tahun tersebut terdapat 1 perkara yang *carry over*, sehingga realisasi kinerja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan pada 2024 mengalami peningkatan kembali menjadi 102.78%. Hal ini menunjukkan komitmen Balai POM di Tabalong dalam menjaga masyarakat dari Obat dan Makanan yang berbahaya, sekaligus memberantas modus kejahatan dibidang obat dan makanan.

6. Sasaran Kegiatan 6 (SK6)

Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Tabalong.

Berikut ini Grafik Tren capaian kinerja SK6 Balai POM di Tabalong tahun 2022-2024



Gambar 1.9 Tren Capaian Kinerja SK 6 Balai POM di Tabalong Tahun 2022-2024

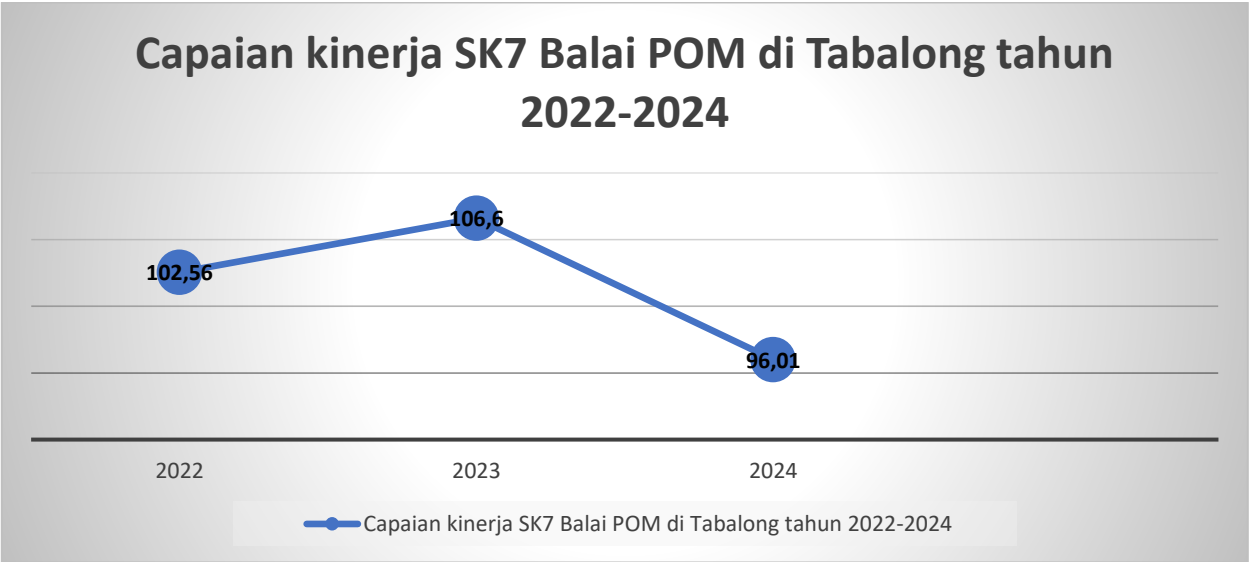
Grafik ini menggambarkan perjalanan Balai POM di Tabalong dalam mewujudkan SK6 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Tabalong yang optimal. Data dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan Tren yang fluktuatif dalam pencapaian kinerja yang terlihat sejak awal pada tahun 2022 dengan capaian yang diperoleh sebesar 100%. Capaian ini mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 96.06%, dikarenakan adanya penetapan target yang terlalu tinggi dari unit pengampu Indikator Kinerja Nilai AKIP UPT, kepada seluruh Loka yang baru dinilai Kinerja Akuntabilitasnya, sehingga tidak dapat tercapainya Nilai AKIP pada tahun tersebut dan pada 2024 mengalami peningkatan kembali menjadi 102.78%. Hal ini menunjukkan adanya pengawasan terhadap manajemen kinerja yang selaras dengan perencanaan kinerja.

7. Sasaran Kegiatan (SK7)

Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Untuk mengukur sasaran kegiatan ini digunakan satu indikator yaitu: Indeks Profesionalitas ASN BPOM.

Berikut ini Grafik Tren capaian kinerja SK7 Balai POM di Tabalong tahun 2022-2024



Gambar 1.10 Tren Capaian Kinerja SK 7 Balai POM di Tabalong Tahun 2022-2024

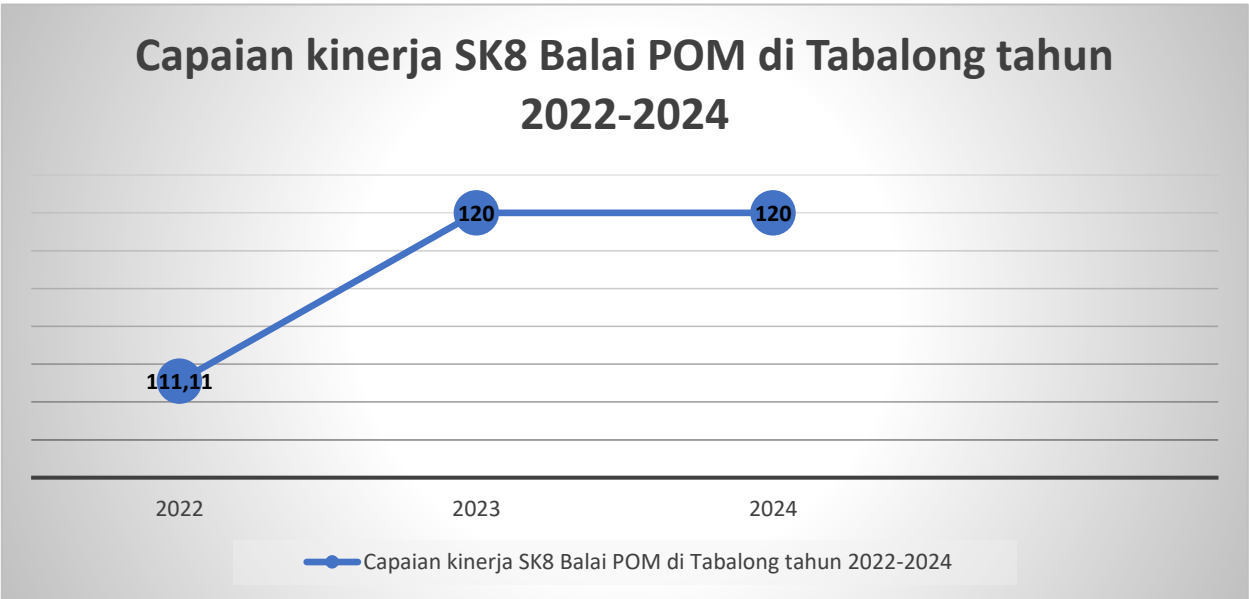
Grafik ini menggambarkan perjalanan Balai POM di Tabalong dalam mewujudkan SK7 : Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal . Data dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan Tren yang fluktuatif dalam pencapaian kinerja yang terlihat sejak awal pada tahun 2022 dengan capaian yang diperoleh sebesar 102.56%. Capaian ini mengalami Peningkatan di tahun 2023 menjadi 106.60% dan 2024 mengalami penurunan menjadi 96.01%. Penurunan Capaian Kinerja ini terjadi dikarenakan adanya perubahan dalam penilaian Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2024.

8. Sasaran Kegiatan (SK8)

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Sasaran Strategis ini diukur menggunakan satu indikator yaitu Indeks Pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal.

Berikut ini Grafik Tren capaian kinerja SK8 Balai POM di Tabalong tahun 2022-2024



Gambar 1.11 Tren Capaian Kinerja SK 8 Balai POM di Tabalong Tahun 2022-2024

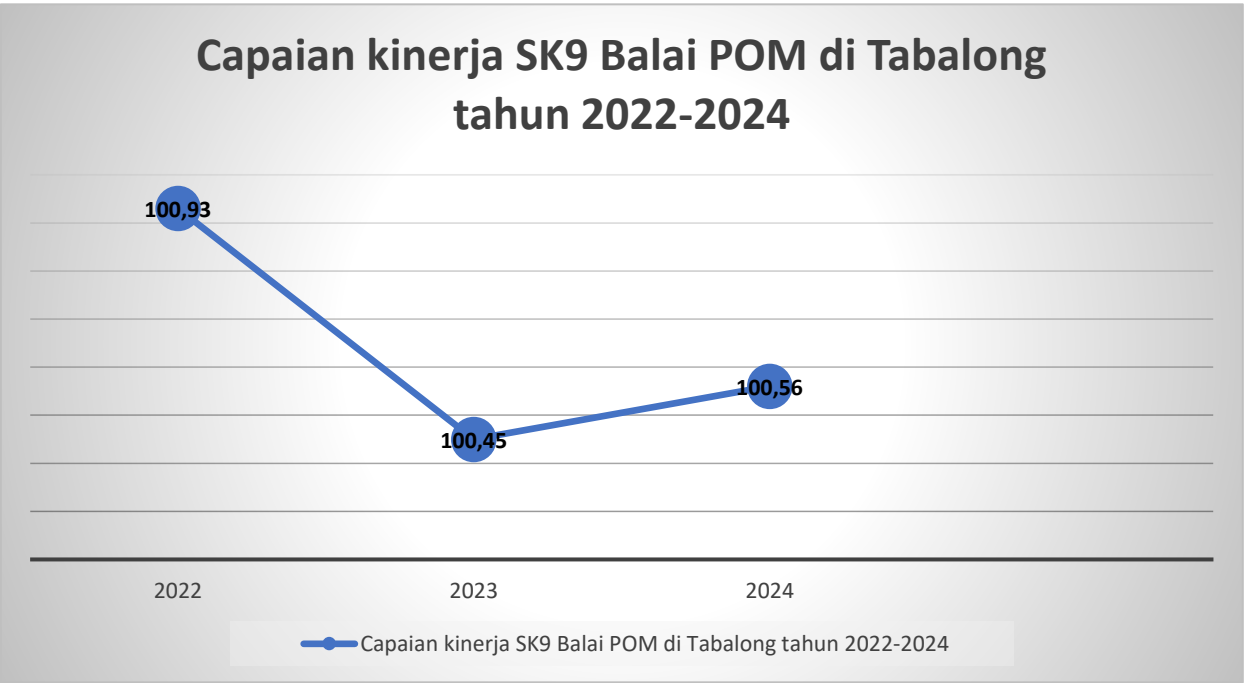
Grafik ini menggambarkan perjalanan Balai POM di Tabalong dalam mewujudkan SK8 : Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan. Data dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan Tren Peningkatan dalam pencapaian kinerja yang terlihat sejak awal pada tahun 2022 dengan capaian yang diperoleh sebesar 111.11%. Capaian ini mengalami Peningkatan di tahun 2023 menjadi 120% dan 2024 tetap pada capaian 120%. Hal ini menunjukkan adanya pengawalan dan komitmen dari Balai POM di Tabalong terhadap manajemen kinerja yang selaras dengan perencanaan kinerja.

9. Sasaran Kegiatan (SK9)

Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Sasaran Kegiatan ini diukur menggunakan indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT.

Berikut ini Grafik Tren capaian kinerja SK9 Balai POM di Tabalong tahun 2022-2024



Gambar 1.12 Tren Capaian Kinerja SK 9 Balai POM di Tabalong
Tahun 2022-2024

Grafik ini menggambarkan perjalanan Balai POM di Tabalong dalam mewujudkan SK9 : Terkelolanya Keuangan Balai POM di Tabalong secara akuntabel. Data dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan Tren yang fluktuatif dalam pencapaian kinerja yang terlihat sejak awal pada tahun 2022 dengan capaian yang diperoleh sebesar 100.93%. Capaian ini mengalami Penurunan di tahun 2023 menjadi 100.45% dan 2024 mengalami peningkatan dengan capaian 100.56%. Meskipun demikian, capaian kinerja yang fluktuatif ini masih berada

diatas target yang direncanakan, hal ini menunjukkan adanya pengawalan terhadap manajemen kinerja yang selaras dengan perencanaan kinerja.

1.1.2 Aspirasi Stakeholder

Dalam menghadapi tantangan masa depan, Balai POM di Tabalong memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan obat dan makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu Balai POM di Tabalong dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tapi juga memungkinkan Balai POM di Tabalong untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi.

Pengawasan obat dan makanan bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, Balai POM di Tabalong dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan yang emergent, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengatur peredaran obat-obatan, dan memastikan ketersediaan produk kesehatan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

Aspirasi masyarakat juga membantu Balai POM di Tabalong dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi obat dan makanan. Hal ini penting agar Balai POM di Tabalong dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif.

Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subjek dan sasaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sistem pengawasan Obat dan Makanan secara global bertujuan untuk menjamin masyarakat yang sehat dengan konsumsi Obat dan Makanan yang aman bermutu dan berdaya saing. Dari sudut pandang lain, masyarakat juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan.

Balai POM di Tabalong menjaring feedback dan aspirasi masyarakat salah satunya melalui Kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan masyarakat atas Kinerja pengawasan Balai POM di Tabalong, yang dimana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder/ masyarakat.

Tabel 1.2 Aspirasi Stakeholder

No	Stakeholder	Harapan Stakeholder
1	Pemerintah Daerah	Kerja sama yang baik, pelaksanaan regulasi yang efektif dan dukungan dalam program pengawasan Obat dan Makanan
2	Masyarakat	Perlunya Sosialisasi dan Publikasi terkait Obat dan Makanan yang aman bagi masyarakat dan standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
3	Pelaku Usaha	Perlunya dilaksanakan Kegiatan Bimtek mengenai CPPOB, CPKB dan CPOTB bagi pelaku usaha
4	Akademisi	Perlunya dilaksanakan kegiatan advokasi Entrepreneurship terkait industri obat dan makanan untuk siswa /mahasiswa.

1.2 Potensi Permasalahan

Dalam menyusun Renstra Balai POM di Tabalong 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. Balai POM di Tabalong, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di wilayah kerja pengawasan Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul (*emerging diseases*), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi.

Mengintegrasikan potensi dan menanggulangi permasalahan dalam konteks agenda pembangunan nasional menjadi prioritas dalam Rencana Strategis Balai POM di Tabalong 2025-2029. Strategi yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan layanan publik yang berkualitas dan mengantisipasi ancaman kesehatan yang akan muncul, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, Balai POM di Tabalong diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan

produk obat dan makanan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera, Rencana Strategis yang komprehensif dan adaptif akan membantu Balai POM di Tabalong tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), Balai POM di Tabalong menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Balai POM di Tabalong periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal Balai POM di Tabalong, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

1.2.1 Kekuatan

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Balai POM di Tabalong, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Balai POM di Tabalong keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Balai POM di Tabalong di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Balai POM di Tabalong, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya :

1. Komitmen kepemimpinan yang kuat

Dalam membangun pondasi yang kuat untuk keberhasilan dan keefektifan jangka panjang, kepemimpinan di Balai POM di Tabalong telah memperlihatkan komitmen yang kuat dan visioner terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Kepemimpinan yang strategis, progresif dan inovatif sangat penting dalam memastikan Balai POM di Tabalong mampu menavigasi lingkungan yang terus berubah dengan kompleksitas dan dinamika yang meningkat. Dengan fokus pada pengawasan obat dan makanan yang aman dan berkualitas, kepemimpinan memastikan Balai POM di Tabalong tidak hanya beradaptasi dengan tantangan saat ini tetapi

juga proaktif mengantisipasi perubahan di masa depan. Melalui penerapan strategi yang matang dan pengambilan keputusan yang bijaksana, kepemimpinan Balai POM di Tabalong berusaha meningkatkan standar pengawasan, mendorong pengembangan metode baru, dan memperkuat sistem pengawasan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Komitmen yang kuat dari kepemimpinan Balai POM di Tabalong menciptakan lingkungan kerja yang responsif dan adaptif, dalam menumbuhkan kemampuan organisasi untuk berinovasi dan berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan dibangunnya Laboratorium Sederhana pada tahun 2024, yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas pegawai Balai POM di Tabalong dalam pelaksanaan pengujian. Laboratorium Sederhana ini berfungsi sebagai sarana pendukung untuk melakukan pengujian awal terhadap sampel obat, pangan olahan, kosmetik, dan obat tradisional yang beredar di wilayah kerja pengawasan Balai POM di Tabalong. Dengan keberadaan laboratorium ini, Balai POM di Tabalong dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pengawasan, mendeteksi potensi pelanggaran standar mutu dan keamanan produk secara lebih cepat, serta memberikan hasil uji yang menjadi dasar pengambilan keputusan tindak lanjut, seperti tindakan pembinaan atau penegakan hukum. Ketersediaan laboratorium ini juga menjadi sarana dalam memperkuat hubungan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait seperti kepolisian daerah, dimana koordinasi dapat berupa penerimaan permohonan pengujian sampel barang bukti perkara pidana yang ditangani oleh kepolisian daerah. Selain itu, laboratorium ini juga berperan sebagai pusat pelatihan teknis bagi pegawai maupun UMKM yang didampingi, sehingga mereka dapat memahami proses pengujian secara langsung dan lebih terlibat dalam peningkatan mutu produk. Inisiatif kepemimpinan ini tidak hanya memastikan Balai POM di Tabalong tetap relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang berkembang tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat dan industri terhadap lembaga. Dengan demikian, kepemimpinan Balai POM di Tabalong telah memposisikan organisasi sebagai lembaga pengawas yang dinamis dan terdepan, yang berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang ketat, adil, dan transparan, serta merespons cepat terhadap perkembangan global dan dalam negeri di bidang obat dan makanan. Beberapa penghargaan yang diperoleh Balai POM di Tabalong sebagai bukti nyata komitmen untuk terus berkembang adalah sebagai berikut:

- 1) Peringkat II Peserta Terbaik Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS Badan POM Gelombang I Angkatan XX T.A. 2024;
- 2) Peringkat I atas Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 kategori Satuan Kerja Loka POM;

- 3) Terbaik III Satuan Kinerja Terbaik dengan Kategori Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Satuan Kerja KPPN Tanjung;
- 4) Terbaik III Satuan Kinerja Terbaik dengan Kategori Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Lingkup Satuan Kerja KPPN Tanjung;
- 5) Terbaik II Satuan Kinerja Terbaik dengan Kategori Kinerja Penyerapan Anggaran Terbaik Kategori Pagu rentang dari Rp 3M sampai dengan 15 M Lingkup Satuan Kerja KPPN Tanjung.
- 6) Terbaik III UPT Informatif Kategori PPID Pelaksana UPT Loka POM
- 7) Terbaik II Unit Kearsipan III Kategori Loka POM Lingkup Badan Pengawas Obat dan Makanan

2. Kemampuan Adaptasi SDM yang baik dengan perkembangan terkini

Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini mencerminkan bagaimana Balai POM di Tabalong secara proaktif dan responsif memperbarui standar, kebijakan, dan metodologi pengawasannya untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis serta perkembangan sains dan teknologi. Sebagai unit pelaksana teknis BPOM, Balai POM di Tabalong berupaya memastikan bahwa regulasi dan prosedur pengawasan yang diterapkan selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan industri obat serta makanan. Hal ini memungkinkan Balai POM di Tabalong untuk menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dalam menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat, sekaligus mendorong inovasi dan daya saing pelaku usaha lokal, khususnya UMKM. Sejalan dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Balai POM di Tabalong berperan dalam mendukung upaya pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak untuk menurunkan prevalensi penyakit tidak menular. Dalam konteks ini, Balai POM di Tabalong secara aktif mempromosikan penerapan kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label (Front of Pack Nutrition Labelling/FOPNL) pada produk pangan olahan. Langkah ini dirancang untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen guna mendorong pola konsumsi yang sehat, sehingga dapat menekan faktor risiko penyakit tidak menular yang berkaitan dengan pola makan yang salah. Sebagai wilayah penyangga IKN Nusantara, penerapan kebijakan ini juga mendukung terciptanya masyarakat yang lebih sehat dan produktif di wilayah strategis tersebut. Selain itu, Balai POM di Tabalong terus meningkatkan kemampuan adaptasinya melalui pengembangan sumber daya manusia, adopsi teknologi terkini dalam proses pengawasan, serta penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Misalnya, penggunaan sistem digital untuk monitoring produk di pasar dan percepatan proses registrasi telah membantu mempercepat

pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi pengawasan.

Dengan pendekatan ini, Balai POM di Tabalong tidak hanya mampu memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat dari risiko produk berbahaya, tetapi juga mendukung pertumbuhan UMKM lokal melalui kebijakan yang mendukung inovasi dan daya saing. SDM Balai POM di Tabalong juga berkontribusi dalam pengembangan berbagai inovasi, misalnya penggunaan aplikasi berbasis online dalam penyelesaian pekerjaan, serta optimalisasi komunikasi dan koordinasi antar pegawai melalui platform digital. Inisiatif tersebut menunjukkan bahwa pegawai tidak hanya adaptif terhadap perubahan, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan solusi inovatif untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah Tabalong. Kemampuan adaptasi ini menunjukkan komitmen Balai POM di Tabalong dalam menghadapi tantangan pengawasan obat dan makanan di masa depan. Dengan terus memperbarui pendekatan dan memperluas sinergi, Balai POM di Tabalong dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan kesehatan masyarakat, sekaligus memastikan keberlanjutan sistem pengawasan yang aman, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah penyangga IKN Nusantara.

3. Kerja Sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid

Balai POM di Tabalong telah membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah lainnya, industri obat dan makanan serta perusahaan swasta yang dapat mendukung pengembangan pelaku usaha obat dan makanan. Kerjasama ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat, akses ke teknologi terbaru, pengetahuan dan praktik terbaik, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan Balai POM di Tabalong dalam mengawasi produk obat dan makanan yang beredar. Melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder, Balai POM di Tabalong dapat memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkannya tidak hanya sesuai dengan standar global tetapi juga relevan dengan konteks lokal, memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di wilayah pengawasan.

Selain itu, kerjasama juga diperkuat dari segi penegakan hukum, dimana dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Balai POM di Tabalong juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang ada di wilayah kerja Balai POM di Tabalong, hal ini diharapkan menjadi jembatan koordinasi yang baik untuk mempererat hubungan antar lembaga sehingga dapat saling bahu membahu dalam penegakan hukum sebagaimana peraturan perundang - undangan yang berlaku. Selama Periode 2022-2024, Balai POM di Tabalong telah menjalin Kerjasama lintas sektor dalam

berbagai program diantaranya Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

4. Reputasi Balai POM di Tabalong yang baik dimata masyarakat

Reputasi positif merupakan aset penting bagi setiap instansi pemerintah, karena menjadi cerminan dari bagaimana masyarakat menilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas lembaga tersebut. Ketika organisasi mampu menunjukkan kinerja yang profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka kepercayaan publik akan tumbuh secara alami. Kepercayaan ini berperan penting dalam menjaga stabilitas organisasi, memperkuat legitimasi kebijakan, serta meningkatkan dukungan masyarakat terhadap program dan layanan yang dijalankan. Dengan reputasi yang baik, organisasi juga lebih mudah menjalin kolaborasi dengan pihak eksternal dan mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan tugas.

Bagi Balai POM di Tabalong, reputasi positif tercermin dari konsistensi dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan secara profesional, transparan, serta berlandaskan data ilmiah. Upaya menjaga akuntabilitas publik dilakukan melalui keterbukaan informasi, pelayanan yang responsif terhadap pengaduan masyarakat, serta pelaporan kegiatan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Balai POM di Tabalong menjadi faktor penting dalam memperkuat peran lembaga sebagai pelindung masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan, sekaligus memperkuat citra BPOM sebagai institusi yang kredibel, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

1.2.2 Kelemahan (*Weakness*)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan obat dan makanan yang terus meningkat, Balai POM di Tabalong tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian khusus dan peningkatan kapasitas. Beberapa aspek dalam operasional Balai POM di Tabalong menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat peran Balai POM di Tabalong sebagai ujung tombak dalam melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman. Berikut adalah kelemahan utama yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut sebagai bagian dari upaya penguatan kinerja Balai POM di Tabalong:

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Balai POM di Tabalong
- Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dihadapi oleh Balai POM di Tabalong berdampak langsung pada kemampuan unit ini dalam menjalankan pengawasan obat dan makanan secara efektif dan menyeluruh, khususnya di wilayah-wilayah terpencil atau sulit dijangkau di wilayah kerja Balai POM di Tabalong. Adapun jumlah sumber daya manusia (SDM) saat ini di Balai POM di Tabalong sebagai berikut :

Tabel 1.3 Pemenuhan ABK pada Balai POM di Tabalong

No	Jabatan	Jenis	ABK	Eksisting	GAP	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Balai POM di Tabalong	Struktural	1	1	0	100%
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Struktural	1	1	0	100%
3	Analisis Pengelola Keuangan Ahli Pertama	Fungsional	2	2	0	100%
4	Arsiparis Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
5	Arsiparis Terampil	Fungsional	1	0	1	0%
6	Penata Laksana Barang Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
7	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Fungsional	8	3	5	37.5%
8	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Fungsional	14	11	3	78.57%
9	Perencana Ahli Muda	Fungsional	1	0	1	0%
10	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	1	1	0	100%
11	Pranata Keuangan APBN Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
12	Pranata Keuangan APBN Terampil	Fungsional	1	0	1	0%
13	Pranata Komputer Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
14	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
15	Pranata SDM Aparatur Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
16	Pranata SDM Aparatur Terampil	Fungsional	1	1	0	100%

17	Penata Layanan Operasional	Fungsional	0	2	-2	100%
18	Pengelola Layanan Operasional	Fungsional	0	1	-1	100%
Total			37	25	12	67.57%

Dengan cakupan wilayah yang luas dan tantangan geografis, keterbatasan ini meningkatkan risiko terjadinya penundaan dalam inspeksi dan pengawasan produk, sehingga memungkinkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas beredar lebih lama di pasaran. Ketidakseimbangan dalam jumlah SDM juga mempengaruhi intensitas dan kualitas pengawasan, menjadikan beberapa wilayah lebih rentan terhadap isu keamanan dan mutu produk. Keterbatasan ini juga berdampak pada pelaksanaan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha, terutama UMKM, tentang pentingnya memproduksi dan mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Balai POM di Tabalong sering kali harus mengoptimalkan SDM yang ada untuk menjalankan berbagai program sekaligus, seperti pendampingan UMKM, inspeksi produk, dan pengawasan di pasar. Beban kerja yang tinggi ini dapat mengurangi efektivitas dalam memberikan pendampingan yang intensif kepada UMKM atau masyarakat lokal, yang menjadi salah satu target utama pengawasan.

Dampak dari kelemahan ini tidak hanya dirasakan dalam operasional internal Balai POM di Tabalong, tetapi juga mempengaruhi kemampuan institusi ini dalam melindungi masyarakat dari risiko produk yang tidak aman. Dengan posisi strategis sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, penting bagi Balai POM di Tabalong untuk memperkuat jumlah, distribusi, dan kompetensi SDM guna memenuhi tuntutan pengawasan yang semakin kompleks serta ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi.

2. Keterbatasan dalam Pengambilan Keputusan

Balai POM di Tabalong sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait perencanaan program, pengelolaan anggaran serta penetapan prioritas kegiatan. Kewenangan utama tetap berada pada unit pusat Badan POM, sehingga ruang gerak UPT dalam menginisiasi kebijakan lokal atau inovasi strategis menjadi terbatas. Kondisi ini dapat menghambat fleksibilitas dan kecepatan dalam menanggapi dinamika lapangan, misalnya ketika menghadapi kasus darurat pengawasan atau kebutuhan koordinasi lintas instansi daerah. Dalam hal ini, Balai POM di

Tabalong perlu memperkuat koordinasi dan advokasi kepada unit pusat dengan menyajikan data kinerja dan kebutuhan daerah secara komprehensif, sehingga dapat mendukung desentralisasi kewenangan yang lebih adaptif dan kontekstual.

3. Risiko Kontaminasi Lingkungan

Balai POM di Tabalong memiliki potensi risiko kontaminasi lingkungan yang bersumber dari kegiatan laboratorium, khususnya dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Jika tidak dikelola dengan baik, limbah tersebut dapat mencemari tanah dan sumber air di sekitar lingkungan kerja, yang pada akhirnya mengancam kesehatan masyarakat. Risiko ini muncul karena belum optimalnya sistem pengelolaan limbah, keterbatasan sarana pendukung seperti tempat penampungan sementara limbah, serta belum adanya kerja sama yang berkelanjutan dengan pihak ketiga berizin dalam pemusnahan limbah B3. Permasalahan ini menunjukkan perlunya penguatan sistem manajemen lingkungan di Balai POM di Tabalong, melalui penerapan prosedur pengelolaan limbah sesuai ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, peningkatan kesadaran pegawai laboratorium terhadap pentingnya K3, serta alokasi anggaran khusus untuk fasilitas pengelolaan limbah berkelanjutan.

4. Kurangnya Kesadaran Personil dalam Pelaksanaan Instruksi Kerja

Selain risiko lingkungan, kelemahan lain pada aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah rendahnya kesadaran personil dalam memahami dan menerapkan instruksi kerja sesuai standar mutu yang berlaku. Sebagian pegawai masih melaksanakan tugas hanya berdasarkan kebiasaan tanpa memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, dan mutu hasil kerja. Kondisi ini menandakan bahwa budaya kerja berbasis mutu belum sepenuhnya terinternalisasi di lingkungan Balai POM di Tabalong. Penyebabnya antara lain kurangnya sosialisasi dan pelatihan K3, lemahnya pengawasan dan evaluasi internal, serta belum efektifnya sistem penghargaan dan sanksi dalam menjaga kepatuhan kerja. Untuk memperbaikinya, perlu dilakukan pembinaan berkelanjutan mengenai pentingnya penerapan instruksi kerja yang sesuai standar mutu dan keselamatan, penguatan sistem audit internal, serta penerapan *reward and punishment* untuk menumbuhkan disiplin kerja dan budaya mutu yang konsisten.

5. Potensi konflik kepentingan dalam menjalankan tugas pengawasan

Dari perspektif integritas, masih terdapat potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya pemanfaatan data internal yang dimiliki, seperti data hasil pengawasan, registrasi produk, maupun data UMKM binaan.

Akibatnya, kegiatan pengawasan menjadi kurang tepat sasaran dan membatasi analitik prediktif. Mengingat peran Tabalong sebagai penyangga IKN, penguatan mendesak dalam pengelolaan dan analisis data adalah kunci untuk mewujudkan pengawasan modern yang berbasis bukti dan proaktif dalam melindungi masyarakat.

6. Terlalu banyak aplikasi yang belum terintegrasi

Salah satu kendala besar dalam aspek teknologi adalah sistem TI yang masih terpisah-pisah antara berbagai unit di BPOM pusat menciptakan hambatan serius dalam proses pelaporan dan alur komunikasi. Balai POM di Tabalong harus menyusun dan mengirimkan laporan ke beberapa unit di BPOM pusat dengan format dan sistem yang berbeda, yang tidak hanya memperlambat proses pelaporan tetapi juga meningkatkan beban kerja administratif serta risiko duplikasi dan kesalahan dalam data. Untuk mengatasinya, perlu ada langkah strategis dalam integrasi sistem pelaporan nasional serta pengembangan *dashboard* lokal terhubung dengan sistem pusat untuk efisiensi dan konsistensi data.

7. Belum Memiliki Bangunan Kantor Permanen

Balai POM di Tabalong belum memiliki bangunan kantor permanen, hal ini merupakan isu strategis dalam elemen aset. Ketiadaan infrastruktur tetap ini berdampak terhadap efektivitas operasional, tata kelola arsip, serta citra kelembagaan di mata publik dan mitra kerja daerah. Akar permasalahannya terletak pada keterbatasan anggaran pembangunan dan prioritas aset yang ditetapkan oleh pusat. Sebagai langkah ke depan, Balai POM di Tabalong perlu menyusun studi kelayakan.

1.2.3 Peluang (*Opurtunity*)

Komponen peluang (opportunity) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan obat dan makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi Balai POM di Tabalong untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan obat dan makanan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh BPOM untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan:

1. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat diwilayah pengawasan Balai POM di Tabalong

Perubahan yang terjadi secara cepat dalam pasar obat dan makanan memberikan tantangan signifikan bagi Balai POM di Tabalong dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian mutu produk yang

beredar di masyarakat Dinamika pasar yang semakin kompleks tersebut dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong munculnya berbagai inovasi, baik dalam bentuk obat, suplemen kesehatan, maupun pangan olahan modern. Produk-produk hasil inovasi, seperti bioteknologi, nanoteknologi, serta pangan fungsional, memerlukan proses evaluasi keamanan, mutu, dan khasiat yang lebih mendalam dibandingkan dengan produk konvensional. Kondisi ini menuntut Balai POM di Tabalong untuk senantiasa memperbaharui pengetahuan teknis, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta mengembangkan metodologi pengawasan yang lebih komprehensif dan berbasis risiko. Selain itu, posisi strategis Kabupaten Tabalong sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadikan tantangan pengawasan semakin besar. Potensi meningkatnya arus distribusi obat dan makanan ke wilayah ini berimplikasi pada perlunya sistem pengawasan yang adaptif, terintegrasi, serta mampu merespons dinamika pasar secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, Balai POM di Tabalong perlu memastikan bahwa seluruh kegiatan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar operasional yang berlaku. Melalui langkah-langkah peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi sistem informasi, serta penguatan kerja sama lintas sektor, Balai POM di Tabalong berkomitmen untuk menjaga agar setiap produk yang beredar di wilayah pengawasannya memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi. Upaya ini menjadi bagian integral dalam mendukung tercapainya tujuan nasional di bidang kesehatan masyarakat serta memastikan perlindungan konsumen dari risiko produk yang tidak aman, terutama dalam konteks pembangunan dan pengembangan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

2. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM

Dalam menghadapi dinamika lingkungan kerja yang semakin kompleks dan tuntutan efisiensi yang tinggi, Balai POM di Tabalong perlu melakukan adaptasi yang berkelanjutan terhadap perkembangan teknologi informasi. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menerapkan digitalisasi dalam proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Penerapan teknologi digital dalam proses bisnis memungkinkan otomatisasi terhadap berbagai kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara manual dan memerlukan waktu serta sumber daya yang besar. Melalui sistem digital, proses seperti registrasi produk, pelaporan hasil pengawasan, verifikasi dokumen, serta pemantauan kepatuhan pelaku usaha dapat dilakukan secara lebih cepat, terintegrasi, dan minim

kesalahan manusia (human error). Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga memperkuat akurasi data serta memperpendek rantai proses birokrasi. Digitalisasi proses bisnis juga mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan sistem yang terdokumentasi secara elektronik, setiap tahapan proses dapat ditelusuri dengan jelas, sehingga memudahkan proses audit dan evaluasi kinerja. Selain itu, penerapan sistem digital memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengakses layanan BPOM secara daring, seperti melalui platform registrasi elektronik, e-sertifikasi, dan pelaporan mandiri. Inovasi ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong transformasi digital di sektor pelayanan publik.

Dalam konteks pengawasan obat dan makanan, digitalisasi juga berperan penting dalam memperkuat sistem monitoring dan evaluasi (monev). Melalui penggunaan dashboard data, analisis tren pelanggaran, serta sistem peringatan dini berbasis data elektronik, Balai POM di Tabalong dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan berbasis bukti (evidence-based decision making). Pemanfaatan teknologi seperti big data, cloud computing, dan integrasi sistem informasi antarinstansi menjadi peluang strategis untuk meningkatkan ketepatan dan kecepatan respons terhadap potensi pelanggaran keamanan produk. Dengan demikian, adaptasi terhadap perkembangan teknologi melalui peningkatan digitalisasi proses bisnis menjadi bagian penting dari strategi transformasi kelembagaan BPOM, termasuk di Balai POM di Tabalong. Upaya ini tidak hanya mendukung efektivitas pengawasan, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui efisiensi, transparansi, dan inovasi berkelanjutan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di bidang obat dan makanan.

3. Kolaborasi dengan *Stakeholder*

Dalam upaya memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan di bidang obat dan makanan, kemitraan strategis dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) menjadi salah satu langkah penting yang dilakukan oleh Balai POM di Tabalong. Kolaborasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana berbagi informasi dan sumber daya, tetapi juga sebagai strategi untuk memperluas jangkauan pengawasan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan. Kemitraan strategis membuka akses yang lebih luas bagi Balai POM di Tabalong terhadap berbagai sumber daya, inovasi, dan praktik terbaik yang relevan dengan pengawasan obat dan makanan. Melalui kerja sama yang terarah dan berkesinambungan, Balai POM di Tabalong dapat memperoleh dukungan teknis maupun nonteknis dari berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi,

pelaku usaha, serta organisasi masyarakat. Dukungan ini memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya menjamin keamanan, mutu, dan gizi produk yang beredar di masyarakat.

Selain itu, kolaborasi dengan stakeholders juga memberikan peluang peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelaksanaan program pelatihan, pendampingan teknis, serta pertukaran pengetahuan dengan lembaga mitra, baik di tingkat nasional maupun global. Melalui kegiatan tersebut, pegawai Balai POM di Tabalong dapat mengembangkan kompetensi teknis, manajerial, dan analitis yang diperlukan dalam menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks di era digital dan globalisasi. Dalam konteks implementasi kebijakan, kolaborasi yang kuat dengan stakeholders juga memungkinkan terwujudnya koordinasi yang lebih efektif dalam pengawasan terpadu. Misalnya, kerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal pengawasan pangan industri rumah tangga, kolaborasi dengan aparat keamanan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran distribusi obat ilegal, serta sinergi dengan sektor pendidikan dalam kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. Pendekatan ini menciptakan ekosistem pengawasan yang partisipatif, di mana seluruh pihak memiliki peran aktif dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat.

Lebih jauh lagi, penguatan kemitraan strategis juga mendukung prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dengan membangun kepercayaan dan hubungan kerja yang saling mendukung dengan para pemangku kepentingan, Balai POM di Tabalong dapat memperluas dampak positif kegiatan pengawasan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, serta memperkuat citra institusi sebagai otoritas yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada perlindungan konsumen. Oleh karena itu, kolaborasi dengan stakeholders bukan hanya menjadi pelengkap dalam pelaksanaan tugas, tetapi merupakan fondasi penting bagi keberhasilan sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di wilayah kerja Balai POM di Tabalong.

4. Peningkatan kesadaran masyarakat

Balai POM di Tabalong memiliki peluang strategis untuk memperkuat peran edukatifnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan obat dan makanan. Upaya ini menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung efektivitas sistem pengawasan, karena keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga pada tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat sebagai konsumen. Melalui pendekatan yang partisipatif dan

komunikatif, Balai POM di Tabalong dapat memperluas dampak pengawasan hingga ke tingkat individu dan komunitas. Salah satu strategi utama dalam upaya tersebut adalah pelaksanaan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang dirancang secara menarik, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Program KIE berfungsi untuk menyebarkan informasi terkait cara memilih, menggunakan, dan menyimpan produk obat dan makanan yang aman, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran produk ilegal atau tidak memenuhi standar. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penyuluhan langsung di masyarakat, edukasi di sekolah dan fasilitas kesehatan, serta penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik. Pemanfaatan media sosial dan media lokal juga menjadi langkah penting dalam memperluas jangkauan komunikasi publik. Dengan strategi digital yang tepat, Balai POM di Tabalong dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan interaktif, khususnya generasi muda yang lebih aktif di ruang digital. Konten edukatif yang dikemas dalam bentuk infografis, video singkat, dan kampanye daring dapat meningkatkan daya tarik serta efektivitas pesan yang disampaikan. Selain penyebaran informasi satu arah, pendekatan partisipatif juga diperlukan untuk membangun kesadaran kolektif dan kepedulian bersama terhadap keamanan produk yang dikonsumsi. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dunia pendidikan, dan pelaku usaha, Balai POM di Tabalong dapat mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan produk melalui pelaporan temuan atau keluhan terhadap obat dan makanan yang mencurigakan. Langkah ini sejalan dengan prinsip *community engagement* dalam pengawasan partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengawasan yang berkelanjutan.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar keamanan pangan serta obat dapat semakin tinggi. Hal ini akan berkontribusi langsung terhadap penurunan risiko peredaran produk ilegal, peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah, serta terciptanya lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat. Secara keseluruhan, peningkatan kesadaran masyarakat melalui kegiatan KIE yang efektif bukan hanya merupakan kegiatan pendukung, tetapi juga merupakan komponen strategis dalam sistem pengawasan obat dan makanan yang holistik. Dengan terus mengembangkan strategi komunikasi yang adaptif, inklusif, dan berbasis data, Balai POM di Tabalong dapat memperkuat citra lembaga sebagai otoritas yang responsif, transparan, dan berkomitmen tinggi terhadap perlindungan kesehatan masyarakat.

5. Perkembangan Inovasi Layanan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta menjawab dinamika kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Balai POM di Tabalong terus mendorong inovasi layanan yang berorientasi pada kemudahan, kecepatan, dan kualitas pelayanan. Salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut adalah peluncuran program SAPA NUSANTARA (Sinergi Pendampingan Mutu Keamanan Izin Edar Produk dan Pengembangan Bisnis UMKM Obat dan Makanan di Wilayah Penyangga IKN Nusantara), yang menjadi inovasi unggulan dalam memperkuat peran BPOM sebagai lembaga pembina sekaligus pengawas obat dan makanan. Inovasi layanan SAPA NUSANTARA dirancang untuk memberikan pendampingan terpadu bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan mutu produk, memastikan keamanan pangan, serta mempercepat proses perizinan edar. Melalui pendekatan sinergis antara Balai POM, pemerintah daerah, dan lembaga pendukung lainnya, program ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat, kompetitif, dan sesuai standar regulasi. Dengan demikian, SAPA NUSANTARA tidak hanya berfungsi sebagai layanan administratif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah strategis penyangga IKN.

Perkembangan inovasi layanan ini menunjukkan transformasi paradigma pelayanan publik di lingkungan BPOM, dari yang semula bersifat reaktif dan administratif menjadi proaktif, kolaboratif, dan berbasis solusi. Melalui SAPA NUSANTARA, Balai POM di Tabalong mampu menghadirkan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat, dengan memadukan aspek edukasi, asistensi teknis, serta fasilitasi regulatori dalam satu mekanisme yang terintegrasi. Inovasi ini juga menjadi sarana strategis dalam meningkatkan literasi keamanan pangan dan obat di kalangan pelaku usaha kecil, yang selama ini menjadi ujung tombak penyedia produk konsumsi bagi masyarakat luas. Lebih jauh, pelaksanaan program ini turut mendukung implementasi prinsip pelayanan publik berbasis digital dan kolaboratif, sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pendampingan dan pelaporan kegiatan SAPA NUSANTARA memungkinkan proses layanan menjadi lebih efisien, transparan, serta mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, sistem pendampingan yang terdokumentasi secara digital juga memudahkan proses audit, evaluasi kinerja, dan pengukuran dampak program secara akurat.

Dari perspektif pengawasan dan peningkatan mutu layanan, SAPA NUSANTARA memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan

kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan produk, sekaligus memperkuat citra Balai POM di Tabalong sebagai lembaga yang adaptif dan inovatif dalam melayani masyarakat. Program ini mencerminkan komitmen BPOM untuk tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga menjadi mitra strategis bagi masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing. Dengan demikian, inovasi layanan masyarakat melalui program SAPA NUSANTARA menjadi bukti nyata bagaimana Balai POM di Tabalong mengintegrasikan aspek pelayanan, pembinaan, dan pengawasan dalam satu sistem yang efektif. Keberlanjutan dan perluasan program ini diharapkan dapat memperkuat daya saing UMKM lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memastikan perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah yang memiliki posisi strategis sebagai penyangga IKN Nusantara.

6. Balai POM di Tabalong berada di wilayah Penyangga Ibu Kota Negara Nusantara

Sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Tabalong memiliki posisi strategis yang menawarkan berbagai peluang untuk memperkuat peran Balai POM di Tabalong. Pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan terjadi seiring pembangunan IKN membuka peluang besar bagi Balai POM di Tabalong untuk mendukung pengawasan dan pemberdayaan pelaku usaha, khususnya UMKM di sektor obat dan makanan. Permintaan terhadap produk yang aman dan bermutu akan meningkat seiring dengan bertambahnya populasi di wilayah penyangga, memberikan Balai POM di Tabalong peran penting dalam memastikan keamanan produk yang beredar. Keberadaan IKN juga akan mendorong peningkatan infrastruktur dan konektivitas di wilayah sekitarnya, termasuk Kabupaten Tabalong. Hal ini mempermudah akses Balai POM di Tabalong untuk melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap pelaku usaha di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan demikian, Balai POM di Tabalong dapat memperluas cakupan pengawasan dan memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam rangka membangun ekosistem pengawasan yang lebih inklusif dan efisien.

Selain itu, lokasi strategis Kabupaten Tabalong memberikan Balai POM di Tabalong untuk berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal melalui program pendampingan UMKM. Sebagai bagian dari penyangga IKN, UMKM di Tabalong memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari rantai pasok produk obat dan makanan yang mendukung kebutuhan penduduk IKN. Balai POM di Tabalong dapat memanfaatkan posisi ini untuk mempercepat proses sertifikasi produk dan meningkatkan daya saing UMKM lokal di pasar

yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Dari sisi kebijakan, pengembangan IKN Nusantara juga membuka peluang bagi Balai POM di Tabalong untuk mendapatkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk anggaran, sumber daya manusia, maupun infrastruktur tambahan. Dengan memanfaatkan momentum ini, Balai POM di Tabalong dapat meningkatkan kapasitasnya untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks, seperti pengawasan terhadap peredaran produk ilegal dan pengembangan inovasi layanan publik berbasis teknologi. Hal ini menjadikan Balai POM di Tabalong sebagai salah satu aktor kunci dalam mendukung keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara, sekaligus memastikan kesehatan dan keselamatan masyarakat di wilayah penyangga IKN.

7. Pertumbuhan UMKM Lokal yang tinggi

Pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) lokal di Kabupaten Tabalong menghadirkan peluang strategis bagi Balai POM di Tabalong untuk memperluas cakupan pengawasan dan pemberdayaan. Sebagai unit pelaksana teknis BPOM, Balai POM di Tabalong memiliki peran penting dalam mendukung UMKM untuk memproduksi obat dan makanan yang memenuhi standar keamanan dan mutu. Dengan berkembangnya UMKM lokal, Balai POM di Tabalong dapat memanfaatkan momentum ini untuk mendukung penguatan daya saing produk lokal, terutama di wilayah strategis seperti penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di mana kebutuhan akan produk berkualitas akan semakin meningkat. Pertumbuhan UMKM juga memberikan peluang bagi Balai POM di Tabalong untuk mendorong penerapan regulasi dan standar nasional seperti Good Manufacturing Practice (GMP). Program pendampingan teknis, seperti SAPA NUSANTARA, memungkinkan UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperoleh sertifikasi yang diperlukan, dan mengakses pasar yang lebih luas. Dengan mendampingi UMKM dalam proses sertifikasi dan registrasi produk, Balai POM di Tabalong dapat mempercepat penetrasi produk lokal di pasar nasional dan internasional, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan mutu produk Tabalong.

Selain itu, pertumbuhan UMKM membuka peluang kolaborasi antara Balai POM di Tabalong dan pemerintah daerah, asosiasi UMKM, serta lembaga pendukung lainnya. Melalui kerja sama ini, Balai POM di Tabalong dapat memanfaatkan sumber daya tambahan untuk melaksanakan program edukasi dan pelatihan yang lebih efektif bagi pelaku UMKM. Edukasi ini mencakup peningkatan kesadaran tentang regulasi, pemahaman tentang bahan tambahan pangan yang aman, serta pengelolaan limbah produksi yang ramah lingkungan. Sinergi ini tidak hanya mendukung pengawasan

yang lebih inklusif tetapi juga menciptakan ekosistem UMKM yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Dari perspektif strategis, pemberdayaan UMKM lokal juga berdampak positif pada pembangunan ekonomi daerah. Produk UMKM yang memenuhi standar BPOM memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Selain itu, produk yang telah terjamin keamanan dan mutunya akan membantu memperkuat citra Kabupaten Tabalong sebagai pusat produksi yang inovatif dan terpercaya, mendukung agenda pembangunan di wilayah penyangga IKN Nusantara. Dengan demikian, pertumbuhan UMKM lokal bukan hanya peluang untuk Balai POM di Tabalong dalam memperluas pengawasan, tetapi juga menjadi katalisator untuk pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

8. Percepatan perkembangan teknologi

Percepatan perkembangan teknologi membawa dampak signifikan terhadap seluruh aspek pengawasan obat dan makanan. Bagi Balai POM di Tabalong, kondisi ini tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga membuka peluang strategis untuk memperkuat efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Peluang utama yang muncul dari perkembangan teknologi adalah terbukanya kesempatan untuk melakukan transformasi digital pada sistem pengawasan. Melalui integrasi teknologi informasi, data pengawasan dapat dikelola secara lebih cepat, akurat, dan terkoordinasi antara Balai POM daerah dengan BPOM pusat. Sistem seperti dashboard monitoring, e-inspeksi, e-audit, dan digital tracking berpotensi meningkatkan kecepatan deteksi pelanggaran serta efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan di lapangan. Selain itu, percepatan teknologi juga menjadi peluang untuk penguatan kapasitas SDM. Pemanfaatan e-learning, pelatihan jarak jauh, serta platform berbagi pengetahuan antarunit memungkinkan pegawai Balai POM di Tabalong terus meningkatkan kompetensi tanpa batasan waktu dan lokasi. Hal ini akan mempercepat transfer pengetahuan, memperkuat kemampuan analisis ilmiah, dan menciptakan SDM yang lebih adaptif terhadap inovasi teknologi pengawasan. Dalam aspek laboratorium, kemajuan teknologi analitik dan otomasi memberikan peluang bagi Balai POM Tabalong untuk meningkatkan kemampuan uji melalui digitalisasi proses laboratorium dan pemanfaatan peralatan modern. Dengan sistem manajemen laboratorium terintegrasi (LIMS), hasil uji dapat terdokumentasi secara digital, mudah dipantau, dan memiliki validitas yang lebih tinggi. Ini akan memperkuat peran Balai POM di Tabalong dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang beredar di wilayahnya.

Perkembangan teknologi juga memperluas ruang bagi inovasi pelayanan publik. Melalui portal informasi, aplikasi pelaporan online, dan edukasi digital, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan obat dan makanan. Hal ini sekaligus meningkatkan literasi dan kepercayaan publik terhadap kinerja Balai POM Tabalong sebagai lembaga yang transparan dan modern. Dari sisi kelembagaan, percepatan teknologi menjadi peluang untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Balai POM di Tabalong dapat menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pelaku industri dalam pemanfaatan teknologi pengawasan, edukasi, dan riset bersama. Sinergi ini akan memperluas jangkauan pengawasan dan memperkuat ekosistem pengawasan berbasis data di daerah.

1.2.4 Ancaman (*Threat*)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis Balai POM di Tabalong. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga Balai POM di Tabalong dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (*Threat*) yang dapat mempengaruhi Balai POM di Tabalong dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang :

1. Tingkat kepatuhan yang bervariasi dari masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan

Tantangan utama Balai POM di Tabalong adalah memastikan penerimaan terhadap kebijakan obat dan makanan nasional, baik dari masyarakat maupun pelaku industri. Di kalangan masyarakat, terutama pedesaan, diperlukan edukasi intensif (KIE) agar memahami manfaat regulasi baru yang mungkin membatasi pilihan produk mereka. Sementara itu, UMKM lokal sering menolak kebijakan baru karena keterbatasan sumber daya untuk mematuhi standar baru atau biaya sertifikasi. Untuk mengatasinya, Balai POM di Tabalong harus bersikap inklusif dan adaptif, yaitu dengan edukasi publik berbasis komunitas dan memberikan pendampingan intensif kepada UMKM berupa pelatihan teknis dan percepatan sertifikasi, sehingga kebijakan dapat berjalan efektif, melindungi kesehatan publik, dan tetap mendukung pertumbuhan usaha lokal. Reputasi dan kepercayaan publik terhadap BPOM sangat bergantung pada keberhasilan dalam mengelola isu variasi kepatuhan ini. Apabila masih banyak ditemukan produk ilegal, tidak terdaftar, atau mengandung bahan berbahaya di pasaran, masyarakat dapat menilai bahwa pengawasan BPOM belum efektif. Padahal, masalah utama sering kali bukan pada lemahnya penegakan hukum, melainkan pada rendahnya kesadaran dan kemampuan pelaku usaha serta konsumen untuk patuh terhadap regulasi. Situasi ini dapat menimbulkan kesalahpahaman

publik dan menurunkan kredibilitas lembaga di mata masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, Balai POM di Tabalong perlu memperkuat strategi komunikasi publik yang proaktif dan berbasis data. Keterbukaan informasi, publikasi hasil pengawasan, serta kampanye edukatif di berbagai media harus terus diperluas agar masyarakat memahami peran BPOM sebagai pelindung kesehatan publik. Dengan meningkatkan transparansi dan kedekatan dengan masyarakat, BPOM dapat memperkuat kepercayaan publik serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga keamanan produk obat dan makanan.

2. E-commerce dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan

Perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat di era digital membawa tantangan baru bagi Balai POM di Tabalong dalam pengawasan obat dan makanan. Dengan semakin maraknya penggunaan platform e-commerce, masyarakat kini dapat dengan mudah membeli produk obat dan makanan hanya melalui ponsel, kapan saja dan di mana saja. Namun, kemudahan ini sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk memperjualbelikan produk ilegal, seperti obat palsu, produk kedaluwarsa, atau pangan yang tidak memenuhi standar keamanan. Sistem user-generated content (UGC) yang diterapkan pada platform e-commerce memudahkan siapa saja untuk membuat akun dan mempromosikan produk, seringkali tanpa melalui verifikasi yang memadai. Kejahatan siber di bidang ini tidak hanya terbatas pada penipuan daring atau peretasan, tetapi juga mencakup penjualan produk yang membahayakan kesehatan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Balai POM di Tabalong, yang memiliki tugas untuk memastikan keamanan produk yang beredar di wilayahnya, termasuk yang berasal dari e-commerce. Tantangan ini semakin kompleks dengan masuknya produk-produk impor yang juga dipasarkan secara daring, sehingga membutuhkan pengawasan lintas wilayah dan kolaborasi dengan BPOM pusat serta pihak berwenang lainnya.

Identifikasi dan pengawasan terhadap produk ilegal ini memerlukan langkah yang dinamis dan inovatif, mengingat tingginya volume transaksi di platform e-commerce. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di tingkat lokal menjadi kendala tambahan dalam menghadapi ancaman ini secara efektif. Balai POM di Tabalong perlu memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta platform e-commerce untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Edukasi kepada masyarakat tentang risiko produk ilegal juga menjadi langkah penting untuk mencegah dampak buruk pada kesehatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, ancaman ini dapat meningkatkan risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja Balai POM di Tabalong dan sekitarnya, mengingat mudahnya akses konsumen terhadap

produk- produk yang berpotensi berbahaya. Dengan mengembangkan pendekatan pengawasan berbasis teknologi, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan meningkatkan kesadaran masyarakat, Balai POM di Tabalong dapat lebih tanggap dalam menghadapi tantangan kejahatan siber di bidang obat dan makanan, sekaligus memastikan perlindungan masyarakat di era digital ini.

3. Adanya ancaman keselamatan petugas dari pihak yang menjadi target pengawasan

Petugas Balai POM di Tabalong memiliki tanggung jawab langsung dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di masyarakat. Kondisi ini menimbulkan potensi risiko keselamatan dan keamanan bagi petugas pengawasan yang bertugas di lapangan, khususnya saat melakukan tindakan pemeriksaan, penertiban, atau penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Dalam beberapa kasus, petugas menghadapi intimidasi, perlawanan verbal maupun fisik, atau hambatan dari pihak yang menjadi target pengawasan seperti pelaku usaha obat dan makanan yang tidak patuh. Balai POM di Tabalong sebagai lembaga pengawasan obat dan makanan perlu menyikapi isu ini dengan kebijakan perlindungan petugas. Oleh karena itu, Balai POM di Tabalong perlu memperluas kerja sama eksternal dengan kepolisian, pemerintah daerah, dan asosiasi pelaku usaha untuk menciptakan pemahaman bersama bahwa pengawasan dilakukan demi kepentingan publik, bukan semata-mata penegakan sanksi. Program pembekalan mental dan manajemen stres juga menjadi bagian penting dari kebijakan K3 untuk menjaga kesehatan psikologis petugas yang sering menghadapi situasi berisiko.

Apabila tantangan ini tidak ditangani secara memadai, dampaknya dapat meluas terhadap efektivitas fungsi pengawasan dan reputasi kelembagaan BPOM secara nasional. Petugas yang merasa tidak aman atau terancam di lapangan cenderung menghindari tugas berisiko tinggi, yang berakibat pada menurunnya frekuensi inspeksi dan efektivitas penegakan hukum. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengurangi kepatuhan pelaku usaha, meningkatkan peredaran produk ilegal, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan pemerintah. Oleh karena itu, isu ini menjadi salah satu tantangan eksternal K3 yang strategis bagi Balai POM di Tabalong, karena menyangkut keberlanjutan operasional, perlindungan sumber daya manusia, serta kredibilitas lembaga dalam menjalankan mandat perlindungan kesehatan masyarakat.

4. Praktik Apotek sebagai Distributor & Dokter Dispensing

Praktik Apotek sebagai distributor dan dokter dispensing (dokter yang menjual obat langsung kepada pasien) menimbulkan beberapa risiko

signifikan terhadap sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Salah satu risiko utama adalah hilangnya kendali atas distribusi obat yang legal dan aman. Hal ini merupakan salah satu bentuk ancaman eksternal dalam aspek fraud yang berpotensi mengganggu integritas sistem pengawasan obat di Indonesia. BPOM perlu menyikapi isu ini melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor dengan Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan organisasi profesi. Edukasi kepada dokter dan apoteker juga penting dilakukan untuk menanamkan etika profesi dan pemahaman bahwa praktik dispensing dan penjualan grosir oleh apotek dapat mengganggu sistem keamanan obat nasional. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas rantai pasok obat, BPOM dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas sistem pengawasan obat nasional dari ancaman fraud yang bersifat sistemik. Jika isu ini tidak tertangani dengan baik, dampaknya akan sangat luas terhadap kesehatan masyarakat dan kredibilitas sistem pengawasan.

Praktik distribusi tidak resmi dapat membuka ruang bagi penyebaran obat palsu, kedaluwarsa, atau tanpa izin edar yang membahayakan keselamatan pasien. Begitu juga dengan obat keras yang memerlukan resep dokter atau antibiotik yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan resistensi dan berdampak pada kesehatan pasien. Kondisi ini dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap efektivitas pengawasan pemerintah di sektor obat dan makanan. Oleh karena itu, pengendalian praktik apotek sebagai distributor dan dokter dispensing harus menjadi fokus pengawasan eksternal BPOM, karena berkaitan langsung dengan aspek integritas sistem, perlindungan masyarakat, serta tata kelola distribusi obat yang legal, aman, dan transparan.

5. Meningkatnya risiko insiden KLB Keracunan Pangan karena pemberian Makan Bergizi Gratis

Ancaman KLB Keracunan Pangan, sangat rentan terjadi pada produk pangan yang diproduksi secara massal. Hal ini dapat memicu krisis kesehatan publik dan merusak kepercayaan masyarakat, yang amat krusial bagi Tabalong sebagai wilayah penyangga IKN. Ancaman ini menuntut Balai POM di Tabalong untuk segera mengoptimalkan analisis data guna melakukan pengawasan prediktif dan proaktif, agar dapat mendeteksi dan mencegah peredaran pangan berbahaya sebelum insiden keracunan terjadi.

Dalam program pemerintah berskala besar, terdapat potensi terjadinya penyalahgunaan dana, manipulasi dokumen mutu, hingga praktik kolusi antara penyedia pangan dan pihak pengawas daerah. Hal ini dapat menghambat efektivitas upaya BPOM dalam memastikan bahwa produk pangan yang dikonsumsi masyarakat benar-benar memenuhi standar

keamanan dan mutu. Oleh karena itu, pengawasan pangan pada program makan bergizi gratis harus diperlakukan sebagai prioritas nasional dengan pendekatan lintas lembaga, berbasis data risiko, dan disertai deteksi dini terhadap anomali dalam rantai pasok.

Apabila isu ini tidak ditangani dengan baik, dampaknya dapat meluas menjadi krisis kesehatan publik dan krisis kepercayaan terhadap sistem pangan nasional. KLB keracunan pangan yang terjadi dalam konteks program pemerintah akan menimbulkan efek reputasional yang berat, tidak hanya bagi penyelenggara program tetapi juga bagi BPOM sebagai lembaga pengawas utama.

Tabel 1.5 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

Strength	Weakness
1. Komitmen kepemimpinan yang kuat 2. Kemampuan adaptasi SDM yang baik dengan perkembangan terkini 3. Kerja Sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid 4. Reputasi Balai POM di Tabalong yang baik dimata masyatabelrakat	1. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) 2. Keterbatasan dalam pengambilan keputusan 3. Risiko kontaminasi lingkungan 4. Kurang kesadaran personil dalam melaksanakan instruksi kerja 5. Potensi konflik kepentingan dalam menjalankan tugas pengawasan 6. Terlalu banyak aplikasi yang belum terintegrasi 7. Belum memiliki bangunan kantor Permanen
Opportunities	Threats
1. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat di wilayah pengawasan Balai POM di Tabalong. 2. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM. 3. Kolaborasi dengan stakeholders 4. Peningkatan kesadaran masyarakat 5. Perkembangan Inovasi Layanan Masyarakat 6. Balai POM di Tabalong berada di wilayah Penyangga Ibukota Negara Nusantara 7. Pertumbuhan UMKM Lokal yang tinggi 8. Percepatan perkembangan teknologi	1. Tingkat kepatuhan yang bervariasi dari masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan. 2. E-commerce dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan. 3. Adanya ancaman keselamatan petugas dari pihak yang menjadi target pengawasan. 4. Praktik Apotek sebagai Distributor & Dokter Dispensing 5. Meningkatnya risiko insiden KLB Keracunan Pangan karena pemberian Makan Bergizi Gratis

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1 Visi BPOM 2025 – 2029

Balai POM di Tabalong sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu :

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:

Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:

BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera:

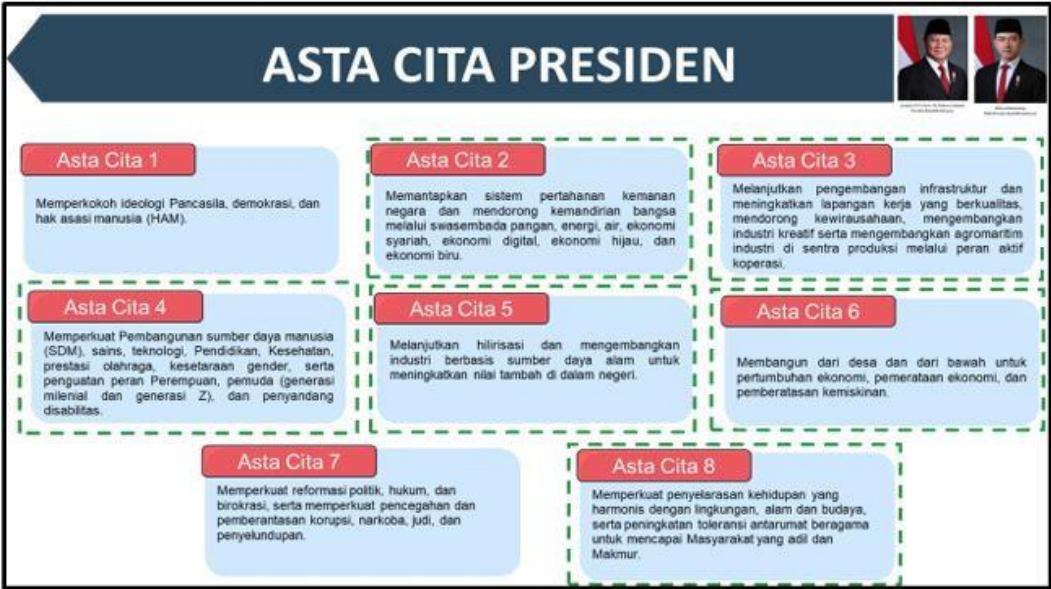
Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan

akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi diatas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Misi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1. Misi Presiden (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik,

baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai POM di Tabalong sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM.

2.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

- 1) Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan Bermutu

Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

- 2) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

- 3) Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Dukungan yang kuat terhadap UMKM

Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan,

yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4) Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5) Terwujudnya organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Balai POM di Tabalong sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM. Secara keseluruhan tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggungjawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1. Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No.	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40

3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

2.4 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai POM di Tabalong, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai POM di Tabalong akan mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas Pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam

pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa

setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya Efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan

ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang Prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan,

akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja.

Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- b. Nilai AKIP UPT BPOM
- c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM
- e. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Tabel 2.2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dalam Indikator Balai POM di Tabalong periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> <i>2. Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> <i>3. Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i> <i>4. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> <i>5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> <i>6. Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> <i>3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i> <i>5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i> <i>7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>

			8. <i>Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 9. <i>Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 10. <i>Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 11. <i>Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan</i> 12. <i>Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar</i> 13. <i>Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT</i> 14. <i>Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium</i> 15. <i>Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman</i> 16. <i>Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)</i>
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi <i>Indikator:</i> <i>Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>

	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
	<i>Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	<i>Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	<i>Indikator: Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i> Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator: Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator: Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu <i>Indikator: Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOOB pangan olahan</i>

Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator:</i> 1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Layanan Publik UPT yang prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i>
			Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal <i>Indikator:</i> 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM 5. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Tabalong 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran kegiatan tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan kegiatan dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan Balai POM di Tabalong untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran kegiatan dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan kegiatan, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran kegiatan Balai POM di Tabalong sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Balai POM di Tabalong

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikator Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Masih beredarnya produk Pangan Olahan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang mengandung bahan kimia obat atau bahan berbahaya	Tersusunnya jadwal pengawasan dan pelaporan tepat waktu; Pelaksanaan Pengawasan yang diprioritaskan penelusuran Pangan Olahan, Kosmetik, dan Obat Bahan Alam mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)	Tim Inspeksi Produk Obat dan Makanan; Tim Inspeksi Sarana Distribusi Obat dan Makanan; Tim Pengujian dan Penanggungjawab Laboratorium
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi/tindak lanjut hasil pengawasan BPOM	Pendampingan pelaku usaha berupa desk dan Bimtek; Pendampingan oleh petugas BPOM baik melalui pengawasan pre market maupun post market	Tim Inspeksi Sarana Produksi Obat dan Makanan
3	Meningkatnya efektivitas KIE	Amplifikasi KIE belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah Kerja Balai POM di Tabalong dan kelompok sasaran secara optimal	Pengelolaan KIE Balai POM di Tabalong yang mencakup tahapan perencanaan berbasis analisis perilaku masyarakat	Tim KIE, Layanan Publik dan Kehumasan
4	Meningkatnya pendampingan	Penerapan Cara Produksi yang baik	a. Inovasi program pendampingan dan edukasi bagi UMKM Obat	Tim Sertifikasi Produk Obat dan Makanan

	UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	tidak dilaksanakan secara konsisten dan sesuai ketentuan pada UMKM Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan UMKM Pangan Olahan	Bahan Alam, Kosmetik dan Pangan Olahan. b. Pembentukan fasilitator di UPT dalam pendampingan UMKM Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Pangan Olahan. c. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap progres pendampingan UMK oleh UPT BPOM. d. Fasilitasi bimbingan keamanan dan mutu Obat Bahan Alam dan Kosmetik dalam pemenuhan CPOTB Bertahap/CPKB. e. Fasilitasi bimbingan keamanan pangan dalam pemenuhan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP- CPPOB)	
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terhambatnya proses penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	a. Koordinasi penanganan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan lintas sektor terkait b. Peningkatan kompetensi PPNS BPOM dalam pelaksanaan penyidikan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara berkala.	Tim Penindakan
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Masih maraknya tautan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal yang diedarkan secara daring	a. Pelaksanaan kegiatan pemantauan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal secara daring b. Peningkatan kapasitas petugas cegah tangkal, intelijen dan siber.	Tim Penindakan

7	Layanan Publik UPT yang prima	Penurunan kualitas layanan yang dapat dilihat dari nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Balai POM di Tabalong	Monitoring dan evaluasi layanan publik secara berkala	Tim KIE, Layanan Publik dan Kehumasan
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Adanya penerimaan gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang pegawai dalam pelaksanaan tugas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	a. Kebijakan anti korupsi antara lain pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan WBS/pengaduan Masyarakat. b. Monitoring dan evaluasi pelaporan Benturan Kepentingan, WBS, Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi. Sosialisasi Anti Fraud.	Tim Tata Usaha

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin. Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang Obat dan Makanan, Balai POM di Tabalong mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk obat dan makanan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi.

Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk dan sarana yang tidak berizin. Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam

pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam

pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.

6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 3.1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGIS
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama sektor.
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data

Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran
--	---

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025- 2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Tabalong

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Balai POM di Tabalong mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut :

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta pengawalan Program MBG
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Balai POM di Tabalong melakukan Analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

1. Melaksanakan intensifikasi dan perluasan pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan, termasuk di lokasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, melalui peningkatan kolaborasi lintas sektor.
2. Mengoptimalkan sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran, serta peningkatan pemanfaatan data intelijen pengawasan dan kanal pelaporan masyarakat
3. Melaksanakan pendampingan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, serta fasilitasi perizinan edar produk
4. Melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) secara daring dan luring untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaporan produk ilegal atau tidak memenuhi ketentuan
5. Memperkuat jejaring kerja sama dengan lintas sektor seperti Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum dan Akademisi pengawasan dan edukasi bersama.
6. Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis, serta optimalisasi penggunaan teknologi digital dalam pengawasan dan pelaporan hasil pengujian

7. Melakukan digitalisasi administrasi dan pelayanan publik, pengelolaan data pengawasan, serta peningkatan integrasi sistem informasi untuk mendukung efisiensi dan transparansi layanan

Tabel 3.2 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Tabalong 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN BPOM	STRATEGI UPT
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Melaksanakan intensifikasi dan perluasan pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan, termasuk di lokasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, melalui peningkatan kolaborasi lintas sektor serta penggunaan aplikasi digital pelaporan hasil pengawasan.
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Mengoptimalkan sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran, serta peningkatan pemanfaatan data intelijen pengawasan dan kanal pelaporan masyarakat.
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Melaksanakan pendampingan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha UMKM pangan olahan dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, serta fasilitasi perizinan edar produk.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) secara daring dan luring untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaporan produk ilegal atau tidak memenuhi ketentuan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Memperkuat jejaring kerja sama Memperkuat jejaring kerja sama dengan lintas sektor seperti Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum dan Akademisi pengawasan dan edukasi bersama.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan teknis, bimbingan fungsional, serta optimalisasi penggunaan teknologi digital dalam pengawasan dan pelaporan hasil pengujian.

Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Melakukan digitalisasi administrasi dan pelayanan publik, pengelolaan data pengawasan, serta peningkatan integrasi sistem informasi untuk mendukung efisiensi dan transparansi layanan.
--	---

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Balai POM di Tabalong juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi tersebut, Balai POM di Tabalong melaksanakan kegiatan prioritas sebagai berikut :

1. Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan

Untuk mendukung arah kebijakan dan strategi di atas, Balai POM di Tabalong melaksanakan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia. Pengawasan yang dilakukan Balai POM di Tabalong mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun dalam hal ini pre market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerjasama dengan lintas sektor dengan instansi pemerintah daerah, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya tersebut bertujuan untuk memperkuat jejaring kolaborasi, meningkatkan kesadaran publik, dan memperluas jangkauan efektivitas sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tabalong.

Kegiatan ini mencakup Rincian Output (RO) Prioritas Nasional sebagai berikut:

- Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, yang meliputi peningkatan ruang lingkup pengujian dan pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium;
- Penanganan perkara di bidang penyidikan obat dan makanan di Balai POM di Tabalong , meliputi kegiatan operasi intelijen, operasi penindakan, pemberkasan, serta pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan (wasmalitrik);
- UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT meliputi kegiatan advokasi dan pendampingan UMKM;

- Sampel makanan yang diperiksa oleh UPT, meliputi pengadaan sampel dan pengujian laboratorium sampel makanan;
- Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar, meliputi pengadaan sampel dan pengujian laboratorium sampel Makanan Bergizi Gratis
- Sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar oleh UPT, meliputi pengadaan sampel dan pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan;
- Sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa oleh UPT meliputi kegiatan pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya;
- Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT meliputi kegiatan pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya;
- Sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan yang diperiksa oleh UPT, yang meliputi pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya serta pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana;

2. Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana

Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana mencakup Rincian Output (RO) sebagai berikut :

- Layanan BMN, yang meliputi pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
- Layanan Perkantoran, yang mencakup penyediaan dukungan operasional, pemeliharaan fasilitas, serta administrasi kepegawaian dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan.

Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan BMN, belanja pegawai (gaji) serta pemeliharaan rutin dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Balai POM di Tabalong. Pengelolaan BMN dilakukan untuk memastikan aset negara tercatat, terpelihara, dan dimanfaatkan secara optimal guna mendukung efektivitas kegiatan pengawasan. Adapun pengelolaan belanja pegawai dilaksanakan untuk menjamin kesejahteraan dan motivasi kerja pegawai, yang pada akhirnya

berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu, Pemeliharaan rutin sarana prasarana mencakup perawatan gedung, kendaraan dinas, peralatan laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya agar tetap dalam kondisi siap pakai dan memenuhi standar layanan publik. Seluruh kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang efektif, efisien, dan berstandar, sehingga mendukung kelancaran tugas Balai POM dalam melindungi masyarakat melalui pengawasan Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Dengan demikian, kegiatan ini merupakan bagian penting dari dukungan manajemen yang berperan langsung dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPOM.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dan mendukung tercapainya sasaran strategis BPOM, Balai POM di Tabalong menyusun matriks kerangka kinerja periode 2025-2029 yang akan menjadi sasaran akhir kinerja BPOM di Tabalong dalam memperkuat pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan khusus di wilayah kerja Balai POM di Tabalong.

Tabel 4.1 Matriks Kinerja Balai POM di Tabalong 2025-2029

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan olahan di wilayah kerja UPT	01	Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		02	Persentase Fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	27	28	29	30
		03	Persentase sampel pangan olahan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	77	79	81	83
		04	Persentase sampel KLB Keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100
		05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	87	90
		06	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	71	71.50	72	72.50	73
		07	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93.5	95	96.5

		08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		09	Persentase Fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97	97.63	98	98.38	98.75
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	95	96	97	97.60	98
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	92	93	94	95
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	8	10	11	13
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	25	50	75	100	100
		16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)	0	81	82	83	84

2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.42	88.29	89.17	90.04	90.91
		02	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	3	4	5	6
		03	Jumlah desa pangan aman	1	1	2	3	3
		04	Jumlah pasar Pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	1
4	Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	11.43	28.57	48.57	71.43	100
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91	92	93	94	95
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
7	Layanan Publik UPT yang Prima	01	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.20	4.30	4.40	4.50	4.60

8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	01	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0	75	75.16	75.33	75.49
		02	Nilai AKIP UPT BPOM	77.99	78.99	79.99	80.99	81.99
		03	Nila Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		04	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.81	2.88	2.93	2.99	3.06
		05	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT	100	0	0	0	0

Indikator Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan UPT sudah tidak ada target pada 2026 dikarenakan Balai POM di Tabalong sudah mengalami peningkatan klasifikasi menjadi Balai pada pertengahan Tahun 2025.

4.2Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan Pangan Olahan, maka Perlu didukung oleh anggaran Pembangunan yang memadai. Kerangka Pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut :

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Balai POM di Tabalong 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	Alokasi Rp				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.221.106.000	1.158.390.000	1.274.229.000	1.401.651.900	1.541.817.090
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.480.834.000	2.756.925.000	3.032.617.500	3.335.879.250	3.669.467.180
Total	3.701.940.000	3.915.315.000	4.306.846.500	4.737.531.150	5.211.284.270

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Balai POM di Tabalong 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi Rp				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	3.701.940.000	3.915.315.000	4.306.846.500	4.737.531.150	5.211.284.270
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	0	0	0	0	0
Total	3.701.940.000	3.915.315.000	4.306.846.500	4.737.531.150	5.211.284.270

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Balai POM di Tabalong Tahun 2025 – 2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, amanat dari peraturan presiden nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Renstra Balai POM di Tabalong 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawah di lingkungan BPOM baik untuk perencanaan menengah dan tahunan.

Rencana Strategis Balai POM di Tabalong Tahun 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai POM di Tabalong untuk 5 (lima) Tahun kedepan. keberhasilan daripada pelaksanaan Renstra tahun 2025- 2029 itu sendiri sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber pendanaannya, serta komitmen yang dijaga secara konsisten oleh pimpinan dan staf.

Rencana Strategis Balai POM di Tabalong Tahun 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI POM DI TABALONG TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator /Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Tabalong								3.701.94	3.915.31	4.306.84	4.737.53	5.211.28	Balai POM di Tabalong	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								1.221.10	1.158.39	1.274.22	1.401.65	1.541.81	Balai POM di Tabalong	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT													
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Tabalong	91	92	93	94	95						
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		0	27	28	29	30						
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	77	79	81	83						

	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100						
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	82	84	87	90						
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		71	71,5	72	72,5	73						
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	92	93,5	95	96,5						
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	92	93	94	95						

	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		97	97,63	98	98,38	98,75						
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	92	93	94	95						
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		95	96	97	97,6	98						
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		91	92	93	94	95						
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		100	100	100	100	100						

	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		11	8	10	11	13						
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		25	50	75	100	100						
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	81	82	83	84						
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans			0	18	20	23	24						
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			57	57	60	63	66						
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			215	219	230	242	256						

	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		12	12	13	14	15						
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		150	164	174	188	202						
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		0	144	144	144	144						
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		1	1	1	1	1						
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		1	1	1	1	1						
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		0	0	0	0	0						
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		0	239	239	239	239						

	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi												
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		100	100	100	100	100					
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT			1	1	1	1	1					
	Meningkatnya efektivitas KIE												
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		87,42	88,29	89,17	90,04	90,91					
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		2	3	4	5	6					
	3	Jumlah desa pangan aman		1	1	2	3	3					
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		1	1	1	1	1					

	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		125	300	360	432	518						
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		21	9	10	11	12						
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		2	3	4	5	6						
	RO 4: Desa Pangan Aman		1	1	2	3	3						
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		1	1	1	1	1						
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu												
1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		11,43	28,57	48,57	71,43	100						
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		4	6	7	8	10						

	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT												
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		91	92	93	94	95					
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan			1	2	3	3	4					
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT												
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar		90	91	92	93	94					
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			14	14	15	15	15					
	Layanan Publik UPT yang prima												

	1	Indeks Pelayanan Publik UPT		4,2	4,3	4,4	4,5	4,6						
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT			5	18	18	18	18						
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal													
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM		0	75	75,16	75,33	75,49						
	2	Nilai AKIP UPT BPOM		77,99	78,99	79,99	80,99	81,99						
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		5	5	5	5	5						
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		2,81	2,88	2,93	2,99	3,06						
	5	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT		100	0	0	0	0						
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			1	1	1	1	1						

	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		1	1	1	1	1						
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		4	4	4	4	4						
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM								2.480.83	2.756.92	3.032.61	3.335.87	3.669.46	Balai POM di Tabalong
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1						
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1						